

# PENDIDIKAN KEBINEKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2017

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan

Indonesia. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

**Pendidikan Kebinekaan pada Satuan Pendidikan Menengah**

Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang, Kemendikbud, 2017  
V, 72h

ISBN: 978-602-8613-77-4

1. Pendidikan Kebinekaan
2. Multikulturalisme
3. Budaya Masyarakat
4. Nilai-nilai Kebinekaan
5. Intoleransi

I. JUDUL

II. PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN, BALITBANG, KEMDIKBUD

III. SERI PENELITIAN KEBIJAKAN

Tim Penyusun : Nur Berlian V. Ali, M.SE

Dr. Mursalim, M.Pd., M.Inf.Tech.

Dr. Untung, M.Pd.

Abdul Aziz Muslim

Irsyad Zamjani, M.Si.

Penyunting : Drs. Philip Suprastowo, PU

Dr. Yaya Jakaria, S.Si., MM

PERNYATAAN HAK CIPTA

© Puslitjakdikbud/Copyright@2017

Hak Cipta dilindungi Undang-undang. Diperbolehkan mengutip dengan menyebut sumber.

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendikbud

Gedung E, Lantai 19

Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270

Telp. 021-5736365; Faks. 021-5741664

Website: <https://litbang.kemdikbud.go.id>

e-mail: [puslitjakbud@kemdikbud.go.id](mailto:puslitjakbud@kemdikbud.go.id)

## KATA SAMBUTAN

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada Tahun 2017 menerbitkan Buku Laporan Hasil Penelitian yang merupakan hasil kegiatan Tahun 2016. Penerbitan Buku Laporan Hasil Penelitian ini dimaksudkan antara lain untuk menyebarluaskan hasil penelitian kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagai wujud akuntabilitas publik Puslitjakdikbud, Balitbang, Kemendikbud, sesuai dengan Renstra Puslitjak Tahun 2016.

Buku Laporan Hasil Penelitian yang diterbitkan tahun ini terkait prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan; Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendidikan Masyarakat; dan Bidang Kebudayaan.

Kami menyambut gembira atas terbitnya Buku Laporan Hasil Penelitian ini dan mengharapkan informasi hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan rekomendasi bagi para pengambil kebijakan dan referensi bagi pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan serta mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penerbitan Buku Laporan Hasil Penelitian ini.

Jakarta, Desember 2017  
Plt. Kepala Pusat,



Dr. Ir. Bastari, M.A.  
NIP 196607301990011001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian ini dengan judul “Pendidikan Kebinekaan pada Satuan Pendidikan Menengah”. Judul ini dipilih Penulis untuk menyadarkan kembali, dan memberikan motivasi tentang pentingnya memelihara dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pendidikan kebinekaan merupakan suatu bentuk layanan pendidikan yang mengenalkan berbagai macam perbedaan dan menjadikan perbedaan tersebut sebagai modal dan potensi untuk saling mengisi dan melengkapi kekurangan, sehingga tercipta suasana hidup yang lebih indah, lebih lengkap, hidup rukun, toleran, dan harmoni.

Laporan ini menjelaskan tentang praktik baik pelaksanaan pendidikan kebinekaan pada satuan pendidikan menengah di dua daerah yang dikenal memiliki keberagaman, antara lain dari aspek agama, suku dan budaya, yaitu Kota Singkawang dan Kota Salatiga. Praktik baik yang diuraikan antara lain kebijakan sekolah yang mengakomodasi kebinekaan, nilai-nilai kebinekaan yang diterapkan dan pembelajaran yang dilakukan guru dan peserta didik baik di dalam maupun di luar kelas. Selain itu, diuraikan pula sejumlah kendala pelaksanaan pendidikan kebinekaan, dan upaya yang ditempuh dalam mengatasi kendala tersebut.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, khususnya para informan di Kota Singkawang dan Kota Salatiga, yaitu: unsur dinas pendidikan, kepala sekolah, para guru, karyawan dan peserta didik di sekolah-sekolah yang menjadi sasaran penelitian, tokoh agama yang tergabung dalam FKUB, akademisi, dewan pendidikan dan pemerhati pendidikan.

Laporan ini tentunya masih belum sempurna, oleh karena itu saran dan kritik membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan laporan pada edisi selanjutnya. Akhir kata Penulis mengucapkan selamat membaca dan semoga laporan ini memberi manfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya. Terima kasih.

Jakarta, Desember 2017  
Tim Peneliti

## **DAFTAR ISI**

|                                                                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>KATA SAMBUTAN .....</b>                                                                                                | <b>iii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                                                | <b>iv</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                                    | <b>v</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                                                             | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang.....                                                                                                    | 1          |
| B. Permasalahan .....                                                                                                     | 5          |
| C. Tujuan Penelitian.....                                                                                                 | 6          |
| D. Pengertian dan Ruang Lingkup .....                                                                                     | 7          |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>                                                                                        | <b>8</b>   |
| A. Definisi Konseptual .....                                                                                              | 8          |
| B. Hasil-hasil Studi Terdahulu .....                                                                                      | 21         |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                                                                    | <b>26</b>  |
| A. Jenis Penelitian .....                                                                                                 | 26         |
| B. Fokus, Lokus dan Waktu Pelaksanaan Penelitian .....                                                                    | 26         |
| C. Subjek dan Informan Penelitian .....                                                                                   | 27         |
| D. Teknik Pengumpulan Data .....                                                                                          | 28         |
| E. Analisis Data.....                                                                                                     | 32         |
| <b>BAB IV PENDIDIKAN KEBINEKAAN DI KOTA SINGKAWANG.....</b>                                                               | <b>34</b>  |
| A. Gambaran Umum Kota Singkawang .....                                                                                    | 34         |
| B. Pendidikan Kebinekaan di Kota Singkawang.....                                                                          | 37         |
| <b>BAB V PENDIDIKAN KEBINEKAAN DI SALATIGA.....</b>                                                                       | <b>44</b>  |
| A. Gambaran Umum Lokasi.....                                                                                              | 44         |
| B. Penerapan Pendidikan Kebinekaan Kota Salatiga .....                                                                    | 48         |
| <b>BAB VI PERSEPSI SISWA SEKOLAH MENENGAH TENTANG<br/>PENDIDIKAN KEBINEKAAN DI KOTA SINGKAWANG<br/>DAN SALATIGA .....</b> | <b>59</b>  |
| A. Sikap Kebinekaan dalam Hubungan Pertemanan .....                                                                       | 59         |
| B. Persepsi Kebinekaan Lingkungan Pembelajaran.....                                                                       | 63         |

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| C. Sikap Kebinekaan dalam Memilih Pemimpin .....  | 66        |
| D. Sikap Kebinekaan Terkait Toleransi Agama ..... | 68        |
| <b>BAB VII SIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>     | <b>72</b> |
| A. Simpulan.....                                  | 72        |
| B. Rekomendasi .....                              | 74        |
| <b>PUSTAKA ACUAN .....</b>                        | <b>76</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara kepulauan yang penduduknya terdiri dari beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Indonesia memiliki semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang bermakna berbeda-beda tetapi tetap dalam satu kesatuan. Perbedaan dan keragaman bukan untuk dipertentangkan, tetapi harus dapat hidup berdampingan dalam sebuah harmoni dan kedamaian bersama. Keragaman merupakan modal sosial dan potensi efektif dalam membangun bangsa.

Fenomena tindakan kekerasan, radikalisme dan terorisme yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan memanipulasi simbol-simbol agama, berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Adanya sementara kelompok orang yang memaksakan kepentingannya melalui cara-cara teror dan kekerasan, dipandang sebagai ancaman bersama terhadap keutuhan bangsa. Semangat kebinekaan dalam konteks persatuan sebagaimana tercantum dalam lambang negara burung Garuda Pancasila, banyak yang masih sebagai simbol semata.

Beberapa kasus kerusakan dan konflik sosial berlatar belakang agama dan etnis terjadi terutama sejak era Reformasi 1998, seperti konflik Ambon tahun 1999-2001, konflik Madura – Dayak di Sampit Kalimantan Tengah<sup>1</sup>, dan konflik Poso. Konflik keagamaan juga terjadi pada kelompok minoritas seperti pada kasus Ahmadiyah di Cikeusik Pandeglang dan kasus perusakan gereja di Temanggung tahun 2011. Dalam kedua kasus tersebut, perilaku kekerasan dan intoleransi

---

<sup>1</sup> Konflik komunal Dayak-Madura, tidak semata karena faktor perbedaan etnis, tapi juga ada aspek politik ekonomi, pelanggaran terhadap norma dan adat istiadat setempat, persaingan kekuasaan dan lainnya. Laporan tentang konflik Dayak-Madura di Sampit bisa dilihat pada laporan ICG (International Crisis Group), Communal Violence in Indonesia; Lesson from Kalimantan, diterbitkan oleh ICG Brussel, Belgia tanggal 27 Juni 2001.

dilakukan oleh aparat dan warga masyarakat.<sup>2</sup> Konflik komunal antara warga asli dengan pendatang di Lampung Tengah pada tanggal 27 November 2014, dipicu di antaranya karena tindakan provokasi dari pihak luar, tindakan kriminal yang melebar ke isu SARA, ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, serta persoalan sosial ekonomi yang menimbulkan kecemburuan social (Komnas HAM, 2014).<sup>3</sup>

Peristiwa teror bom Sarinah tanggal 14 Januari 2016 membuktikan adanya perilaku intoleransi dengan menggunakan cara-cara kekerasan untuk memaksakan kehendak satu kelompok. Sebelumnya peristiwa perusakan rumah ibadah gereja di Singkil Aceh pada pertengahan Oktober 2015, serta pembakaran masjid di Tolikara Papua pada 17 Juli 2015 menjelang shalat Idul Fitri, memperlihatkan masih terdapatnya perilaku intoleransi di masyarakat.

Berbagai peristiwa tersebut di atas adalah sebuah pengingkaran terhadap sebuah kemajemukan. Perilaku intoleransi berupa tindakan kekerasan dan konflik sosial merupakan dampak dari tiadanya pemahaman terhadap pentingnya nilai-nilai multikultural dalam kehidupan masyarakat yang sangat plural. Konflik kekerasan dan perilaku intoleransi atas nama, suku, etnis dipicu karena adanya kecurigaan dan prasangka sosial. Kultur dan kebijakan politik Orde Baru selama 32 tahun yang serba otoriter dengan warna tunggal, seolah menafikan adanya perbedaan dan keragaman di masyarakat. Tafsir politik dan hegemoni kebenaran yang didominasi oleh rezim kekuasaan, membuat masyarakat tidak memiliki alternatif lain. Semuanya serba tunggal, satu dan tidak boleh berbeda atau dibedakan.

---

<sup>2</sup> Untuk mengetahui kronologis dari kasus kekerasan terhadap warga Ahmadiyah di Cikeusik Pandeglang, dapat dibaca laporan investigasi KontraS yang berjudul " Negara Yang Tak Kunjung Terusik, Laporan HAM peristiwa penyerangan Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik Pandeglang", oleh KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan), 19 April 2011.

<sup>3</sup> Hasil lengkap kasus konflik Lampung Tengah dapat dibaca pada laporan Komnas HAM (2014) tentang pemantauan dan penyelidikan peristiwa bentrokan antarwarga, di Dusun Tanjung Rejo, Desa Tanjung Harapan, Kec. Tuha Kab. Lampung Tengah.

Pasca Orde Baru dan munculnya reformasi, muncul kesadaran di masyarakat untuk membangun kesadaran kolektif bahwa Indonesia sebenarnya adalah bangsa yang majemuk yang memiliki perbedaan. Perbedaan tidak harus disatukan atau ditunggalkan, tapi tetap dipelihara sebagai sebuah kesatuan yang indah. Asas kebangsaan yang menghormati perbedaan sebagaimana tercantum dalam “Bhinneka Tunggal Ika” (Berbeda-beda tapi tetap satu) yang sudah lama menjadi perekat sosial, membutuhkan sebuah revitalisasi dan reaktualisasi di masyarakat. Keanekaragaman tidak perlu dipaksa untuk dilebur, tapi diberikan sebuah ruang kebebasan untuk bisa hidup dan berkembang dalam sebuah ruang keteraturan sosial (*harmony in diversity*).

Urgensi pendidikan multikultural tidak semata terkait karena perbedaan agama, tapi juga menyangkut hubungan antaretnis di Indonesia, terutama antara pribumi dan nonpribumi (Tionghoa). Dalam kasus etnis Tionghoa, dianggap perlu adanya materi pembelajaran sejarah Tionghoa di Indonesia dalam materi pendidikan. Hal ini penting untuk mengurangi kesalahpahaman terhadap etnis Tionghoa dan perannya baik sosial, ekonomi dan politik. Ada 5 kajian yang bisa dijadikan bahan dalam pembelajaran sejarah Tionghoa yaitu dari sejarah pemikiran dan filsafat keagamaan, sejarah peradaban dan kebudayaan, sejarah nasional dan lokal, sejarah sosial atau masyarakat dan sejarah konstitusional. Diharapkan dari kelima aspek kajian tersebut, keberadaan sejarah Tionghoa di Indonesia bisa menjadi bagian dari pendidikan kebinekaan yang akan mampu mengintegrasikan etnis Tionghoa dengan lainnya, sehingga pendidikan kebinekaan tidak sekedar hanya menumbuhkan sikap toleransi, saling menghormati dan membiarkannya tumbuh sebagai bagian dari HAM tapi juga pendidikan kebinekaan juga bisa lebih meng-Indonesia-kan semua kelompok etnis, suku, agama yang ada didalamnya<sup>4</sup>.

Dalam aspek kebijakan nasional, kesadaran akan perlunya sebuah pendidikan multikultural tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pada Bab III Pasal 4

---

<sup>4</sup> Lihat tulisan Hendra Kurniawan, Sejarah Tionghoa sebagai Pendidikan Kebinekaan, dalam Majalah BASIS Nomor 11-12 tahun ke 64, 2015

ditekankan bahwa prinsip pendidikan dilaksanakan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan. Oleh sebab itu setiap kebijakan pendidikan yang diskriminatif dan tidak menghormati kebinekaan, merupakan sebuah pengingkaran terhadap pelaksanaan UU Sisdiknas.

Urgensi pendidikan kebinekaan sebagai upaya untuk melakukan deradikalisasi dan mendorong sikap toleransi dalam menyikapi perbedaan dan keragaman, juga ditekankan dalam visi misi presiden Joko Widodo sebagaimana tercantum dalam Nawa Cita Sembilan Agenda Perubahan. Dalam agenda kesembilan ditekankan pentingnya memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebinekaan dan menciptakan ruang dialog antarwarga. Agenda kesembilan tersebut dituangkan dalam RPJMN 2015-2019 melalui 3 arah kebijakan dan strategi pembangunan yaitu: (a) Pendidikan karakter dan pekerti bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal; (b) Pelindungan, pengembangan dan aktualisasi nilai dan tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkuat khasanah budaya bangsa; dan (c) Peningkatan pemahaman tentang nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan. Ketiga arah kebijakan tersebut yang menjadi acuan arah strategi kebijakan Renstra Kemdikbud 2015-2019 dalam mendorong pentingnya pendidikan kebinekaan melalui pendidikan kewargaan di sekolah untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan, memperkuat nilai-nilai toleransi, menumbuhkan penghargaan pada keragaman sosial-budaya, memperkuat pemahaman mengenai hak-hak sipil dan kewargaan, serta tanggung jawab sebagai warga negara yang baik (*good citizen*).

Berangkat dari kondisi di atas, dipandang perlu untuk melakukan sebuah penelitian kebijakan terkait pendidikan kebinekaan atau pendidikan multikultural. Hal ini karena fakta sosial kultural menunjukkan bahwa Indonesia adalah negeri yang sangat beragam dalam hal etnis, suku, agama, budaya, dan bahasa. Urgensi pendidikan kebinekaan diperlukan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kultur, tradisi, adat, dan nilai-nilai budaya dari masing-masing etnis, agama, suku, ras, dan daerah. Selain itu juga untuk membangun

sebuah pemahaman dan sikap toleransi dan menghargai terhadap perbedaan, mendorong sikap adil dan tidak diskriminatif terhadap kelompok lain, dan kemauan untuk bekerjasama di antara kelompok masyarakat dalam mewujudkan harmoni sosial.

## **B. Permasalahan**

Beberapa permasalahan dari fakta yang berkembang di masyarakat, yaitu:

1. Perilaku intoleransi berupa tindakan kekerasan dan konflik sosial kerap masih terjadi di masyarakat;
2. Masih berlaku dominasi atau diskriminasi mayoritas terhadap minoritas, bahkan pemaksaan sehingga hak-hak minoritas terpinggirkan;
3. Paham dan tindakan radikal masih menjadi ancaman bagi keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Kurangnya pemahaman terhadap pentingnya nilai-nilai multikultural dalam kehidupan masyarakat yang sangat plural.

Sekolah yang di dalamnya terdiri dari berbagai unsur (siswa, guru, kepala sekolah, dan pegawai lainnya) merupakan bagian dari masyarakat yang tinggal di sekelilingnya. Dari sekolah kita bisa mengetahui bagaimana siswa dan warga sekolah yang lain menjalankan aktivitas dan bagaimana mereka memberikan persepsinya terkait kehidupan atau pergaulan yang mencerminkan kebinekaan. Oleh karena itu beberapa permasalahan yang terjadi di masyarakat akan didekati melalui sekolah dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimanakah kebijakan sekolah dalam mengelola kebinekaan di lingkungan sekolahnya? Bagaimanakah visi, misi, kebiasaan, aturan, program, kegiatan sekolah terkait dengan kebinekaan?
2. Nilai-nilai kebinekaan/multikultural apa saja yang diterapkan sekolah dalam membentuk karakter siswa di sekolah? Bagaimanakah nilai toleransi, tidak diskriminatif, adil, nasionalisme, kerjasama, menghargai, kepercayaan, nilai kerukunan,

nilai perdamaian diimplementasikan dalam pembelajaran di sekolah?

3. Bagaimanakah guru menanamkan nilai-nilai kebinekaan kepada siswa dalam pembelajaran di kelas? Bagaimanakah metode pembelajaran, kurikulum, sarana prasarana, silabi dalam penanaman nilai karakter tersebut?
4. Bagaimanakah peran *stakeholder* (alumni, komite sekolah, orangtua dan lainnya) dalam pengembangan pendidikan kebinekaan di sekolah?
5. Bagaimanakah peran dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan pendidikan kebinekaan di sekolah?

### **C. Tujuan Penelitian**

#### **1. Tujuan Umum**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk merumuskan bahan kebijakan dalam mengelola pendidikan kebinekaan pada satuan pendidikan.

#### **2. Tujuan Khusus**

Tujuan Khusus penelitian ini untuk memperoleh informasi tentang:

- a. kebijakan sekolah dalam menerapkan nilai-nilai kebinekaan/multikultural;
- b. nilai-nilai kebinekaan yang dikembangkan di sekolah;
- c. peran guru dalam menerapkan pendidikan kebinekaan;
- d. peran *stakeholder* dalam pengembangan pendidikan kebinekaan;
- e. peran dan kebijakan pemerintah daerah dalam implementasi pendidikan kebinekaan.

#### **D. Pengertian dan Ruang Lingkup**

Dalam penelitian ini, kebinekaan diberi pengertian dan pemaknaan sebagai berikut.

1. Mengadaptasi konsep multikulturalisme, yaitu adanya kesediaan untuk menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa mempedulikan perbedaan budaya, etnik, jender, bahasa, ataupun agama;
2. Sejalan dengan pendapat Bennet (1986) bahwa asumsi dasar pendidikan multikultural adalah bagaimana kelompok-kelompok etnik yang beragam dapat menentukan sendiri budaya asli yang mereka miliki, serta pada saat yang bersamaan dapat menjadi multikultural.
3. Bagian penting dari pendidikan kebinekaan atau multikultural adalah bagaimana menumbuhkan sensitivitas siwa akan budaya masyarakat yang bersifat plural.

Penelitian ini membatasi ruang lingkup pada hal-hal berikut ini.

1. Kebinekaan dibatasi pada ruang lingkup keberagaman yang bersifat kodrati terutama etnis, agama, dan budaya;
2. Satuan pendidikan dalam lingkup pendidikan menengah.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Definisi Konseptual**

##### **1. Nilai-Nilai Kebinekaan**

Bangsa Indonesia merupakan bangsa dengan karakteristik majemuk, beragam budaya (multikultur). Keragaman/kebinekaan bangsa Indonesia dapat ditinjau dari berbagai aspek seperti suku bangsa, adat istiadat, bahasa, agama/kepercayaan, serta etnis. Jika ditinjau dari jumlah penduduk, Indonesia negara berpenduduk terbesar kelima dengan jumlah mencapai 254,9 juta jiwa berdasar Susenas BPS tahun 2015. Luas wilayah Indonesia mencapai 1.904.569 km<sup>2</sup>. Wilayah Indonesia tersusun atas 34 propinsi, 440 kabupaten/kota, 5.263 kecamatan, serta 62.806 desa. Jumlah pulau di Nusantara sekitar 17.667 terdiri dari pulau besar dan kecil.

Suku-suku yang hidup di berbagai wilayah/pulau Nusantara sekitar 1.128 suku bangsa<sup>5</sup>. Berdasar data SP2010, Suku Jawa adalah suku terbesar dengan proporsi 40,05 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Menempati posisi kedua adalah Suku Sunda sebesar 15,50 persen. Keragaman bahasa daerah mencapai 749 bahasa daerah<sup>6</sup> dan ada sekitar 350 etnis dan adat istiadat yang menandai kebinekaan bangsa Indonesia. Menurut Koentjaraningrat keragaman suku bangsa Indonesia digolongkan ke dalam 19 daerah berdasarkan sistem lingkaran hukum adat yang dibuat oleh Van Vollenhoven.<sup>7</sup>

Keragaman bangsa Indonesia berdampak dalam kehidupan sosial dan kebangsaan. Adanya perbedaan latar belakang budaya, adat istiadat, agama, serta geografis berpengaruh terhadap karakter dan kepribadian masyarakat Indonesia. Di samping itu, pola perilaku masyarakat

---

<sup>5</sup> <http://www.jpnn.com/berita.detail-57455>, diakses pada 4 April 2016.

<sup>6</sup> <http://www.otda.kemendagri.go.id/index.php/berita-210/2086-bahasa-daerah-terancam>, diakses pada 4 April 2016.

<sup>7</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi Indonesia I* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 193.

Indonesia berbeda satu sama lain berdasar nilai-nilai yang hidup dan diyakini sebagai pedoman. Dalam relasi sosial, karakter dan pola perilaku yang beragam tidak jarang menimbulkan prasangka buruk hingga pertikaian horizontal. Walaupun demikian, perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia juga dipandang sebagai modal sosial bagi bangsa Indonesia. Keragaman bangsa Indonesia merupakan harta yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kesadaran nasionalisme bangsa Indonesia sebagai satu bangsa senantiasa diperlukan untuk mengatasi segala perbedaan yang ada baik suku, agama, budaya, bahasa, adat istiadat. Keragaman tersebut disikapi sebagai faktor yang membentuk kesatuan sebagai sebuah bangsa. Di dalam kehidupan berbangsa, keragaman yang ada perlu dipupuk dan dipelihara dengan tetap menjunjung tinggi prinsip sebagai satu bangsa. Kesadaran bangsa Indonesia satu bangsa dengan keragamannya tercermin dari semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan tersebut menjadi dasar bagi kehidupan sosial kemasyarakatan dan kebangsaan bangsa dan negara Indonesia. Dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika memuat sejumlah prinsip yaitu: (a) Dalam membentuk kesatuan dan berbagai keanekaragaman, Bhinneka Tunggal Ika tidak membentuk konsep baru seperti agama baru; (b) Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat sektarian dan eksklusif; (c) Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat formalisme yang hanya memperlihatkan perilaku semu; (d) Bhinneka Tunggal Ika bersifat konvergen (menyatukan) tidak divergen.

Kehidupan berdasar prinsip kebinekaan merupakan bentuk kehidupan sosial yang ditandai adanya keragaman, multikultur. Bentuk kehidupan sosial yang dilandasi rasa saling menghormati dan toleransi satu sama lain antarkelompok yang berbeda. Bangsa Indonesia menata kehidupan sosial berdasarkan prinsip penghormatan terhadap kemanusiaan, kesetaraan sebagai anak bangsa, solidaritas dan toleransi atas perbedaan bangsa Indonesia baik agama, etnis, bahasa, pandangan politik terintegrasi dan terbingkai ke dalam Negara Kesatuan RI.

Prinsip kehidupan sosial atas dasar kemajemukan/kebinekaan dalam tata kehidupan bangsa Indonesia memiliki sejumlah alasan dari berbagai perspektif/tinjauan (Koentjaraningrat, 2014), yaitu:

*Pertama*, alasan dari perspektif *historis sosiologis*; keragaman bangsa Indonesia baik dari agama, suku, budaya, adat istiadat, etnis, maupun bahasa merupakan realita yang yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Keragaman yang ada di bumi Indonesia merupakan anugerah dan rizki yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, “Berkat Rahmat Allah” demikian disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945. Sejak awal bangsa dan negara Indonesia merdeka, keragaman telah hidup subur sepanjang wilayah Nusantara. Sebab itu, realitas yang ada perlu disyukuri dan tidak perlu diingkari. Bentuk rasa syukur yang tertinggi dalam wujud menjaga dan mengembangkannya bagi kehidupan bangsa Indonesia agar menjadi baik dan maju.

*Kedua*, alasan dari perspektif *historis-ideologis*; keanekaragaman bangsa Indonesia berdampak pada cara pandang hidup yang beragam berdasarkan keyakinan, agama, maupun nilai-nilai adat kebiasaan. Ideologi merupakan persoalan fundamental suatu negara, termasuk bagi bangsa Indonesia. Ideologi menggambarkan cita-cita kehidupan ideal sebuah bangsa di masa depan. Pendirian negara kebangsaan Indonesia telah menghasilkan suatu kesepakatan ideologi negara Pancasila yang mengatasi semua pandangan dan keyakinan yang dimiliki orang-orang, suku-suku, dan masyarakat yang hidup di wilayah Nusantara. Pancasila menjadi ideologi yang menyatukan perbedaan pandangan hidup bangsa Indonesia.

*Ketiga*, alasan dari perspektif *historis-politis*; keragaman dalam kesatuan bangsa Indonesia merupakan bentuk keputusan politik bangsa/pendiri Indonesia yang tertinggi. Bangsa Indonesia telah mengambil keputusan final dalam mendirikan negara kebangsaan Indonesia atas dasar (a) Negara kesatuan RI, (b) Ideologi negara Pancasila, dan (c) Kesatuan Bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia mendirikan negara bukan atas dasar kesukuan atau kedaerahan. Demikian pula, para pendiri negara tidak berupaya mendirikan kembali kerajaan-kerajaan yang pernah ada di wilayah Nusantara. Negara yang

dibuat para pendiri yakni negara kebangsaan, sebuah konsep negara atas dasar kesamaan tujuan, sejarah, dan nasib yang sama yaitu negara kebangsaan Indonesia.

*Keempat*, alasan dari perspektif *pedagogis*; keragaman dalam konteks pendidikan menggambarkan kemajemukan latar belakang peserta didik. Perbedaan latar belakang kultural menjadi salah satu prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Dalam pasal 4 UU Sisdiknas dinyatakan, “Penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan”. Di samping itu, kurikulum yang dikembangkan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal, kebutuhan pembangunan daerah.

Pembelajaran dalam proses pendidikan kebinekaan mendorong guru untuk mendesain kegiatan pembelajaran yang mengakomodir perbedaan sosial budaya, etnis dan bahasa, serta ekonomi. Kebinekaan dalam perspektif pedagogis juga bermakna proses pembelajaran yang mengedepankan nilai-nilai/karakter toleransi, penghormatan pada perbedaan, kesetaraan, demokrasi, dan persatuan.

## **2. Pendidikan Kebinekaan**

Menurut Banks, sejarah awal munculnya pendidikan multikultural atau kebinekaan, awal pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1961 itu merupakan suatu gerakan reformasi yang ditujukan pada perubahan pendidikan yang selama ini melakukan tindak diskriminasi terhadap masyarakat “minoritas,” yaitu masyarakat yang berada di luar “*white-male-Protestant-Anglo Saxon (WMPA)*”. Gerakan pendidikan multikultural itu adalah gerakan untuk mereformasi lembaga-lembaga pendidikan agar memberikan peluang yang sama kepada setiap orang, tanpa melihat asal-usul etnis, budaya, dan jenis kelaminnya, untuk sama-sama memperoleh pengetahuan, kecakapan (*skills*), dan sikap yang

diperlukan untuk bisa berfungsi secara efektif dalam negara-bangsa dan masyarakat dunia yang beragam etnis dan budaya.<sup>8</sup>

Dalam konteks masyarakat Amerika, Banks menjelaskan tentang 12 prinsip utama yang perlu dilakukan dalam proses pendidikan multikultural. Prinsip pertama; pembelajaran guru (*teacher learning*). Pendidikan multikultural harus memiliki program yang secara profesional dapat membantu guru mengembangkan kemampuannya dalam memahami karakteristik masyarakat yang kompleks menyangkut hubungan dan interaksi sosial antara etnis, suku, agama, bahasa, yang mempengaruhi perilaku sosial mereka. Prinsip kedua; sekolah harus bisa memastikan bahwa setiap murid memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pengajaran dengan standar sama. Prinsip ketiga; kurikulum harus bisa membantu siswa dalam memahami sebuah pengetahuan sebagai sebuah hasil konstruksi sosial dan merefleksikan pengalaman penulis/peneliti dalam konteks sosial, politik, ekonomi di mana mereka tinggal dan berkarya.

Prinsip keempat; sekolah memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk terlibat dalam kegiatan ekstra dan intra kurikuler dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan dalam pencapaian prestasi akademik dan hubungan sosial yang lebih baik. Prinsip kelima; sekolah harus menciptakan keanggotaan kelompok secara lintas sektoral yang lebih banyak. Prinsip keenam; siswa harus belajar hal-hal terkait *stereotype* dan hubungan lainnya yang dianggap bias, serta dampak negatif yang dihasilkannya. Prinsip ketujuh; siswa harus belajar berbagi nilai kebajikan dalam internal kelompok maupun antar-kelompok seperti nilai kebajikan, keadilan, kebebasan, perdamaian, kepedulian sosial dan lain-lain. Prinsip kedelapan; guru harus membantu siswa dalam berinteraksi secara efektif dengan siswa lain dari berbagai ras, suku, etnis dan agama. Prinsip kesembilan; sekolah harus memberikan kesempatan kepada siswa dari berbagai ras, suku, etnis untuk berinteraksi dengan mengurangi rasa ketakutan. Prinsip kesepuluh; organisasi sekolah harus memiliki strategi dan memastikan bahwa semua

---

<sup>8</sup> James A. Banks. *An Introduction to Multicultural Education*. Boston: Allyn and Bacon, 2002, page 5

keputusan sekolah diputuskan secara bersama dan berlaku untuk semua. Prinsip kesebelas; para pemimpin daerah harus bisa memastikan bahwa semua sekolah mendapatkan bantuan dana secara adil. Prinsip keduabelas; guru harus menggunakan teknik dan pendekatan budaya yang beragam dalam menilai pengetahuan siswa dan keterampilan sosialnya.<sup>9</sup>

Sedangkan Paul C. Gorski menjelaskan tujuan reformasi pendidikan lewat gerakan pendidikan multikultural itu untuk mengubah sistem pendidikan yang lebih berbasiskan sosial, kesetaraan-keadilan pendidikan, pedagogi kritis, dan dedikasi, dalam rangka memberikan pengalaman pendidikan yang memungkinkan semua peserta didik mengembangkan sepenuh-penuhnya seluruh potensi dirinya, dan menjadi anggota masyarakat yang sadar sosial dan berperan aktif secara lokal, nasional, dan juga global<sup>10</sup>. Dengan demikian, terdapat tiga tujuan utama pendidikan multikultural (yang boleh disebut sebagai sasaran instrumental dan terminal), yaitu: (a) meniadakan diskriminasi pendidikan, memberi peluang sama bagi setiap anak untuk mengembangkan potensinya (tujuan instrumental); (b) menjadikan anak dapat mencapai prestasi akademik sesuai potensinya (tujuan terminal internal); (c) menjadikan anak sadar sosial dan aktif sebagai warga masyarakat lokal, nasional, dan global (tujuan terminal akhir eksternal).

Pendidikan kebinekaan adalah sebuah pendidikan yang mengembangkan kepada penghormatan dan penghargaan terhadap kemajemukan. Dalam perspektif Bikhu Parekh, pendidikan kebinekaan merupakan pendidikan yang memerdekakan dari berbagai bias dan prasangka etnosentris, dan memerdekakan untuk mengeksplorasi dan belajar dari berbagai perspektif dan budaya lain. Artinya pendidikan kebinekaan diperlukan agar setiap peserta didik memiliki kesadaran akan

---

<sup>9</sup> James A Banks, *Diversity Within Unity: Essential and Principal for Teaching and Learning in Multicultural Society*. Published by Center For Multicultural Education, College of Education, University of Washington, Seattle, 2001, page 3

<sup>10</sup> Paul C. Gorski (2010). "The challenge of defining 'multicultural education'." Diakses dari [www.edchange.org/multicultural/initial.html](http://www.edchange.org/multicultural/initial.html).

pentingnya budaya kemasyarakatan<sup>11</sup>. Bikhu Parekh membagi multikulturalisme meliputi tiga hal; pertama, multikulturalisme berkenaan dengan budaya; kedua, merujuk pada keragaman yang ada; dan ketiga, berkenaan dengan tindakan spesifik pada respon terhadap keragaman tersebut. Proses dan cara bagaimana multikulturalisme sebagai doktrin normatif menjadi ada dan implementasi gagasan-gagasan multikultural yang telah dilakukan melalui kebijakan-kebijakan politis, dalam hal ini kebijakan-kebijakan pendidikan<sup>12</sup>.

Untuk mengokohkan sebuah pendidikan kebinekaan, maka ada lima pilar yang harus dimiliki yaitu; Pertama, integrasi kurikulum pendidikan yang menempatkan keragaman dalam satu kultur pendidikan. Artinya nilai multikultural bisa disisipkan dalam semua matapelajaran sebagai sebuah pesan moral. Kedua, konstruksi pengetahuan yang diwujudkan untuk mengetahui dan memahami bersama keragaman yang ada. Ketiga, menghilangkan segala macam prasangka buruk (*prejudice*) antarelemen keragaman dalam kultur pendidikan. Keempat, pedagogik kesetaraan memberikan ruang bersama secara lebih adil dan tidak diskriminatif kepada semua elemen pendidikan yang beragam. Tidak boleh ada elitisme dan eksklusifisme dalam praktik pendidikan. Kelima, memberdayakan budaya sekolah terhadap setiap elemen pendidikan.<sup>13</sup>

Pendidikan kebinekaan tidak hanya semata difokuskan kepada kelompok sosial, agama dan budaya mainstream. Menurut HAR Tilaar, fokus pendidikan kebinekaan merupakan sikap peduli dan mau mengerti ataupun pengakuan terhadap orang lain yang berbeda. Sikap *indeference* dan *nonrecognition* tidak hanya berdasar struktur rasial, tapi juga paradigma pendidikan multikultural yang mencakup subjek ketidakadilan, kemiskinan, penindasan, dan keterbelakangan kelompok minoritas dalam berbagai aspek sosial, ekonomi, budaya, pendidikan,

---

<sup>11</sup> Bikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism; cultural diversity and political theory*, Cambridge; Harvard University Press, 2000

<sup>12</sup> Bhiku Parekh, *The Concept of Multicultural Education in Sohen Modgil, et.al.(ed) Multicultural Education the Intermittable Debate*. London: The Falmer Press, 1996

<sup>13</sup> Ridwan al-Makassary (Ed.), *Cerita Sukses Pendidikan Multukultural di Indonesia*, sebuah laporan tentang evaluasi intervensi program pendidikan multikultural oleh TifA bekerjasama dengan CSRC UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, Jakarta, 2010, hlm. 7.

dan lainnya.<sup>14</sup> Istilah pendidikan multikultural dapat digunakan, baik pada tingkat deskriptif dan normatif yang menggambarkan isu-isu dan masalah-masalah pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat multikultural. Lebih jauh juga mencakup pengertian tentang pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi pendidikan dalam masyarakat multikultural. Dalam konteks deskriptif, maka pendidikan multikultural seyogyanya berisikan tentang tema-tema mengenai toleransi, perbedaan *ethno-cultural* dan agama, bahaya diskriminasi, penyelesaian konflik dan mediasi, hak asasi manusia, demokratisasi, pluralitas, kemanusiaan universal, dan subjek-subjek lain yang relevan.<sup>15</sup>

### 3. Model Pembelajaran dalam Pendidikan Kebinekaan

Pembelajaran merupakan proses pengembangan potensi serta internalisasi nilai-nilai yang penting bagi peserta didik. Guru mengembangkan desain pembelajaran sehingga memudahkan peserta didik untuk belajar, menguasai pengetahuan, keterampilan, serta dapat menginternalisasi nilai dan budaya yang menjadi tujuan pembelajaran. Dalam mendesain pembelajaran, guru mempertimbangkan segala komponen proses kegiatan belajar. Ada dua variabel pokok yang menentukan keberhasilan proses kegiatan belajar yaitu: (a) kondisi pengajaran yang mencakup: tujuan pengajaran, karakteristik bidang studi, kendala, dan karakteristik pembelajaran; (b) metode pengajaran yaitu terdiri dari strategi pengorganisasian, penyampaian, dan pengelolaan.<sup>16</sup> Gulö menyatakan bahwa mengajar adalah usaha menciptakan sistem lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar secara optimal.<sup>17</sup> Kegiatan pembelajaran melibatkan komponen-komponen pendukung seperti metode, pendekatan, media, sarana pembelajaran, dan lainnya.

---

<sup>14</sup> H.A.R. Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Paedagogik Transformatif Untuk Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 15.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>16</sup> I Nyoman Sudana Degeng, *Ilmu Taksonomi Variabel* (Jakarta: Depdikbud, 1989), hlm. 37, 83.

<sup>17</sup> W. Gulö, *Strategi Belajar Mengajar* (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 8.

Kegiatan pembelajaran dapat dilihat dari dua perspektif, pertama sebagai suatu produk dan kedua sebagai suatu proses. Pembelajaran sebagai produk berarti kegiatan pembelajaran dipandang sebagai hasil, produk akhir dari beberapa proses. Makna pembelajaran berarti perubahan perilaku. Perubahan perilaku yang nyata jarang atau tampak jarang menjadi perhatian para teoritikus. Menurut Ramsden, teoritikus lebih memfokuskan pada perubahan perilaku dalam cara-cara yang dengannya orang memahami, mengalami, atau mengonseptualisasi dunia di sekitar mereka. Pembelajaran dipandang sebagai suatu proses yakni merupakan dinamika sosial dalam pemberian makna kemanusiaan. Dalam penelitian Säljö, memberikan lima kategori pembelajaran yakni: (a) Pembelajaran sebagai sebuah peningkatan pengetahuan kuantitatif yang berarti pembelajaran sebagai proses mendapatkan informasi atau mengetahui banyak hal; (b) Pembelajaran sebagai proses mengingat, yaitu proses menyimpan informasi yang dapat direproduksi; (c) Pembelajaran sebagai proses mendapatkan fakta-fakta, keterampilan, dan metode-metode yang bisa dikuasai dan digunakan sebagai kebutuhan; (d) Pembelajaran sebagai proses memahami atau mengabstrakkan makna; (e) Pembelajaran sebagai proses penafsiran dan pemaknaan akan realitas dalam sebuah cara yang berbeda.<sup>18</sup>

Model pembelajaran atau pola pembelajaran adalah *blueprint* atau kerangka dasar. Menurut KBBI, model berarti pola (contoh, acuan, ragam, dan sebagainya) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan.<sup>19</sup> Model juga berarti sebuah gambaran mental yang membantu kita memahami sesuatu yang tidak bisa kita lihat atau alami secara langsung.<sup>20</sup> Model pembelajaran berarti pola bagaimana proses pembelajaran berlangsung. Berarti pula suatu gambaran dari lingkungan pembelajaran sebagaimana dinyatakan Joyce and Weil, “A *model of teaching is a description of a learning environment.*”<sup>21</sup> Model

---

<sup>18</sup> Mark. K. Smith, *Teori Pembelajaran dan Pengajaran* (Yogyakarta: Mirza Media Pustaka, 2009). hh. 30-31.

<sup>19</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 923.

<sup>20</sup> Smith., *Op. Cit.*, h. 77.

<sup>21</sup> Bruce Joyce and Marsha Weil, *Models of Teaching* (Massachusetts: A Simon & Schuster Company 1996,) hlm. 7.

pembelajaran sangat berperan dalam memandu proses belajar secara efektif.

Model pembelajaran yang dikembangkan dalam proses kegiatan belajar mengajar mencakup unsur-unsur pokok pembelajaran, yaitu: (1) *Syntax*: langkah-langkah operasional pembelajaran; (2) *Social system*: suasana dan norma yang berlaku dalam pembelajaran; (3) *Principles of reaction*: menggambarkan bagaimana seharusnya guru memandang, memperlakukan, dan merespon siswa; dan (4) *Support system*: segala sarana, bahan, alat, atau lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran.

Pembelajaran kebinekaan sebagai upaya dalam membekali peserta didik tentang nilai-nilai kemajemukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peserta didik dikembangkan untuk dapat memiliki sikap kesediaan mengakui, menerima dan menegaskan perbedaan dan persamaan manusia baik perspektif gender, ras, suku, etnis, maupun kelas sosial. Pada hakikatnya pembelajaran kebinekaan identik dengan pembelajaran multikulturalisme yaitu kebijakan dalam praktik pendidikan dalam mengakui, menerima dan menegaskan perbedaan dan persamaan manusia baik secara gender, ras, suku, etnis, kelas/golongan sosial.

Implementasi model pembelajaran kebinekaan di sekolah dapat ditinjau dari unsur pokok model pembelajaran, sebagai berikut:

*Social System* yaitu bagaimana kondisi kelas dalam model pembelajaran kebinekaan yang akan dialami peserta didik. Sistem sosial mencakup dua komponen yaitu suasana dan norma yang menjadi rujukan perilaku peserta didik. Suasana kelas yang dikembangkan mencerminkan: (a) keanggotaan *kelompok* belajar siswa lintas sektoral/kultur; (b) proses belajar memberikan kesempatan kepada siswa dari berbagai ras, suku, etnis untuk berinteraksi dengan mengurangi rasa ketakutan; (c) semua aturan kelas diputuskan secara bersama dan berlaku untuk semua.

*Principles of Reaction*, yaitu tugas dan peran guru yang semestinya dilakukan dalam pembelajaran. Dalam proses belajar

mengajar, peran guru sangat penting. Begitu pula dalam proses pembelajaran kebinekaan, guru berperan dalam mengintegrasikan nilai-nilai *kebinekaan* di dalam kelas. Ramsey menyatakan guru faktor kunci dalam membantu semua peserta didik mencapai potensinya tanpa melihat: *gender, ethnicity, age, religion, language, or exceptionality*. Karena itu, model pengajaran dan pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan peserta didik yang beragam secara budaya.<sup>22</sup>

Peran guru dalam pembelajaran kebinekaan sebagaimana dinyatakan Banks, dkk antara lain: (a) mendorong siswa belajar tentang hal-hal yang terkait *stereotype* dan hubungan lainnya yang dianggap bias serta dampak negatif yang dihasilkannya; (b) mendorong siswa belajar berbagi nilai kebajikan dalam internal kelompok maupun antar-kelompok seperti nilai kebajikan, keadilan, kebebasan, perdamaian, kepedulian sosial dan lain-lain; (c) guru membantu siswa dalam berinteraksi secara efektif dengan siswa lain dari berbagai ras, suku, etnis dan agama; (d) guru menggunakan teknik dan pendekatan budaya yang beragam dalam menilai pengetahuan siswa dan keterampilan sosialnya.<sup>23</sup>

*Support System*, di antaranya mencakup lingkungan sosial. Menurut Gay, pengajaran secara kultural responsif pada perbedaan siswa dari berbagai ras, etnis, budaya, dan bahasa. Pembelajaran melibatkan strategi seperti membangun dan merancang budaya yang relevan dan merepresentasikan multikultural untuk membantu menjembatani kesenjangan antara apa yang siswa sudah tahu dan menghargai dengan apa yang mereka akan diajarkan. Strategi yang juga digunakan berupa pembelajaran transformasi informasi tentang rumah dan masyarakat ke dalam praktek kelas yang efektif dan menurut Moll menggunakan anggota masyarakat dan orangtua sebagai sumber belajar.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Ilknur Tarman and Bülent Tarman, "Developing Effective Multicultural Practices: A Case Study Of Exploring A Teacher's Understanding And Practices," *The Journal of International Social Research*, Vol. 4, Issue: 17, Spring 2011, p. 578-598.

<sup>23</sup> Banks, et.all., *Op. Cit.*, p. 3.

<sup>24</sup> *Ibid.*, p. 7.

#### 4. Kebijakan Pendidikan Kebinekaan

Kebijakan pendidikan kebinekaan dalam sistem pendidikan nasional dapat dikaji dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Dasar kebijakan pendidikan kebinekaan yaitu: (a) UU Nomor 20 Tahun 2003; (b) Agenda Prioritas Pembangunan Nawa Cita Kesembilan; (c) RPJPM 2015-2019; (d) Renstra Kemendikbud 2015-2019.

Pendidikan nasional berdasarkan Bab III Pasal 4 UU Nomor 20 Tahun 2003 dilaksanakan berdasarkan prinsip demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan. Dalam agenda prioritas pembangunan kesembilan (Nawa Cita) pemerintahan Presiden Joko Widodo, pendidikan kebinekaan merupakan kebijakan untuk memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebinekaan dan menciptakan ruang dialog antarwarga.

Pelaksanaan pendidikan kebinekaan, merujuk pada RPJPM 2015-2019 dilakukan melalui tiga strategi yaitu: (a) Pendidikan karakter dan pekerti bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal; (b) Peningkatan pemahaman tentang nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan; (c) Perlindungan, pengembangan dan aktualisasi nilai dan tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkuat khasanah budaya bangsa.

Pendidikan karakter dalam Renstra Kemendikbud 2015-2019 sebagai upaya merevolusi karakter bangsa Indonesia. Upaya mewujudkan sasaran revolusi karakter bangsa dilakukan dengan mengembangkan pendidikan kewargaan di sekolah untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan, memperkuat nilai-nilai toleransi, menumbuhkan penghargaan pada keragaman sosial-budaya, memperkuat pemahaman mengenai hak-hak sipil dan kewargaan, serta tanggung jawab sebagai warga negara yang baik (*good citizen*), melalui hal sebagai berikut:

- a. Penguatan pendidikan kewargaan yang terintegrasi ke dalam matapelajaran yang relevan yaitu: PKN, IPS (Sejarah, Geografi, Sosiologi/Antropologi), Bahasa Indonesia;

- b. Penguatan pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk memperkuat nilai-nilai moral, akhlak, dan kepribadian peserta didik dengan memperkuat pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam matapelajaran;
- c. Penyelenggaraan pendidikan kewargaan melalui organisasi sosial kemasyarakatan yang berorientasi untuk memperkuat wawasan kebangsaan di kalangan warga negara dalam rangka meneguhkan jati diri bangsa melalui pemahaman mengenai nilai-nilai multikulturalisme dan penghormatan pada kemajemukan sosial; dan
- d. Pelibatan peran orangtua dan masyarakat dalam pengelolaan persekolahan dan proses pembelajaran, untuk mencegah perilaku menyimpang yang tak sesuai dengan norma susila dan nilai moral.

## 5. Fungsi Pendidikan Kebinekaan

Pendidikan kebinekaan dalam konteks kebangsaan berfungsi untuk memperkuat semangat nasionalisme dan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Ada 4 nilai inti (*core value*) yang bisa dilakukan dalam pengembangan nilai-nilai kebinekaan dalam perspektif lokal maupun global yakni: (a) ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (b) tanggung jawab terhadap negara kesatuan, (c) penghargaan, pengakuan, dan penerimaan keragaman budaya, (d) menjunjung tinggi supremasi hukum, dan (e) penghargaan martabat manusia. Dalam konteks Indonesia, implementasi pendidikan kebinekaan dapat diposisikan kepada tiga hal yaitu:

- a. **Sebagai falsafah pendidikan;** yaitu pandangan bahwa kekayaan keberagaman budaya Indonesia hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengembangkan dan meningkatkan sistem pendidikan dan kegiatan belajar-mengajar di Indonesia guna mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur (*berbarkat*) dan bahagia dunia akhirat.
- b. **Sebagai pendekatan pendidikan;** yaitu penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan yang kontekstual, yang memperhatikan keragaman budaya Indonesia. Nilai budaya diyakini mempengaruhi pandangan, keyakinan, dan perilaku individu (pendidik dan peserta

didik), dan akan terbawa ke dalam situasi pendidikan di sekolah dan pergaulan informal antarindividu, serta mempengaruhi pula struktur pendidikan di sekolah (kurikulum, pedagogi dan faktor lainnya).

- c. **Bidang kajian dan bidang studi;** yaitu disiplin ilmu yang—dibantu oleh sosiologi dan antropologi pendidikan—menelaah dan mengkaji aspek-aspek kebudayaan, terutama nilai-nilai budaya dan perwujudannya (norma, etiket atau tatakrama, adat-istiadat atau tradisi dan lain-lain—mencakup “manifestasi budaya” agama) untuk/dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan. Hasil telaah dan kajian ini akan dapat menjadi bidang studi yang diajarkan secara operasional (dan kontekstual) kepada para calon pendidik yang mungkin akan berhadapan dengan keragaman budaya (tidak harus untuk semua). Sebaliknya, “proses pendidikan yang multikultural” itu pun harus juga terus dikaji ditelaah, baik efektivitas dan efisiensinya, maupun—dan terutama—kesesuaiannya dengan situasi dan kondisi Indonesia, dan ketepatan sesuai dengan hakekatnya<sup>25</sup>.

## **B. Hasil-hasil Studi Terdahulu**

Pendidikan kebinekaan di Indonesia sudah banyak dilakukan oleh beberapa pihak. Mereka menggunakan istilah pendidikan multikultural, pendidikan kebangsaan atau pendidikan kewarganegaraan. Penelitian yang dilakukan *Center of Study Religion and Cultural* (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Ciputat tahun 2010, mencoba mengeksplorasi beberapa cerita sukses tentang pendidikan multikultural yang dilakukan di tiga kota (Yogyakarta, Jakarta dan Banten), memberikan sebuah temuan bahwa keberhasilan pendidikan multikultural banyak dipengaruhi oleh visi dan komitmen sekolah, kapasitas guru dan kurikulum<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> Zamroni. *Pendidikan demokrasi pada masyarakat multikultural*. Yogyakarta: Gavin Kalam Utama, 2011

<sup>26</sup> Ridwan al-Makassary (Edit), *Cerita Sukses Pendidikan Multukultural di Indonesia*, sebuah laporan tentang evaluasi intervensi program pendidikan multikultural oleh TifA bekerjasama dengan CSRC UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, Jakarta, 2010,

Visi dan komitmen guru sangat dipengaruhi oleh kebijakan kepala sekolah, komite sekolah, dan—kalau lembaga swasta—pengurus yayasan sekolah; sedangkan kapasitas guru, dalam hal ini adalah pemahaman dan pengetahuan guru tentang nilai-nilai multikultural, serta metode pembelajaran guru dalam menyampaikan pelajaran di kelas, sangat mempengaruhi keberhasilan penanaman nilai multikultural. Model pembelajaran yang cenderung tidak demokratis, indoktrinasi, ceramah hanya membuat nilai multikultural sebagai sebuah pemahaman dan pengetahuan, tidak sampai menjadi sikap dan perilaku sosial siswa baik di kelas maupun di luar kelas.

Dari sisi kurikulum matapelajaran, ada dua pelajaran yang mempengaruhi anak dalam memahami nilai-nilai multikultural yaitu pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan agama yang ada selama ini tidak banyak mengajarkan anak tentang nilai multikultural seperti toleransi, demokrasi, kerjasama, menghormati perbedaan. Pendidikan agama selama ini lebih banyak bersinggungan dengan aspek ritual dan sosial dalam membentuk kesalehan individu, bukan kesalehan sosial; sedangkan materi pendidikan kewarganegaraan banyak mengajarkan keragaman sisi etnis, suku dan budaya bangsa, sejarah kebangsaan dan wawasan nusantara. Secara material sudah cukup bagus untuk mendukung nilai multikultural, namun dari sisi model pembelajaran, lebih banyak dilakukan secara dogmatif dan indoktrinasi, sehingga miskin dalam penghayatan dan pemaknaan dalam kehidupan sosial siswa.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Ubeidilah Badrun dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tentang pengembangan model pendidikan kebangsaan untuk pemuda lintas kultural. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan terhitung April-September 2015. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pola pendidikan kebangsaan yang ada selama ini masih dianggap belum disusun secara sistemik, terintegrasi dan kontekstual. Oleh sebab itu penelitian ini menawarkan model pendekatan pendidikan kebangsaan yang dikenal dengan istilah *Score-a* yang merupakan akronim dari *Spatial awareness*, *cultural awareness*, *organizational awareness*, *religion awareness*, dan *economy awareness*. Kelima model tersebut dijadikan modal utama dalam

memahami basis wawasan kebangsaan. Kelima model pendekatan berangkat dari 3 kerangka filsafat ilmu yaitu *ontologis*, *epistemologis* dan *aksiologis*, yang menjelaskan arti kebangsaan melalui formulasi kurikulum, bahan ajar dan model evaluasi.<sup>27</sup>

Penelitian lain tentang sejauhmana pemahaman siswa terhadap nilai multikultural seperti toleransi, bisa dilihat dari hasil survey yang dilakukan oleh *Setara Institute for Democracy and Peace* (SIDP) tentang persepsi siswa SMU Negeri di Jakarta dan Bandung tentang Toleransi. Dari populasi sebanyak 171 SMU negeri, diambil sampel sebanyak 114 dengan rincian 76 SMU di Jakarta, dan 38 SMU di Bandung, dengan model pengambilan data secara random sampling. Hasil survey ini memperlihatkan bahwa secara umum tingkat pemahaman dan pengetahuan siswa tentang toleransi sudah cukup bagus dan pandangan keagamaan mereka lebih moderat. Toleransi dipahami sebagai menghormati perbedaan dan menjaga agar tidak terjadi konflik sebanyak 75%. Dari sisi materi pelajaran, temuan survey menyatakan bahwa 31% materi pendidikan agama tidak mendukung nilai-nilai kebinekaan. Pandangan siswa terhadap persetujuan dasar negara Pancasila diganti dengan agama, sebanyak 8,5%, sebuah jumlah yang meskipun kecil tapi cukup mengkhawatirkan mengingat pemahaman ini muncul dari sekolah negeri yang seharusnya urusan masalah kebangsaan (dasar negara) sudah beres. Hal yang mengejutkan adalah adanya dukungan siswa SMU terhadap gerakan ISIS sebanyak 9,8%, sebuah data yang cukup mengkhawatirkan untuk menggambarkan kondisi siswa SMU terkait masalah dukungan kelompok/organisasi teroris seperti ISIS. Hal ini berarti ada 1 dari 14 siswa yang mendukung organisasi teroris.<sup>28</sup>

Data survey *Setara Institute* terkait dukungan kalangan muda terhadap ISIS yang berjumlah 9,8%, diperkuat oleh hasil survey SMRC (*Saiful Mujani Research Consulting*) pada awal Januari 2016 di mana sebanyak 4% warga berusia 22-25 tahun, dan 5% warga yang berusia sekolah atau kuliah, menyatakan tahu tentang ISIS dan mendukung

---

<sup>27</sup> Lihat hasil penelitian Ubeidilah Badrun dkk, *Pengembangan Model Pendidikan Kebangsaan Bagi Pemuda Lintas Budaya*, 2015,

<sup>28</sup> Laporan Survey SETARA Institute Tentang Perspesi Siswa SMU Negeri di Jakarta dan Bandung terhadap Toleransi, 2015

gerakan ISIS. Data ini cukup mengejutkan banyak pihak. Meskipun jumlahnya sangat sedikit (kurang dari 10%) tapi mereka berasal dari kalangan menengah terpelajar yang memiliki akses informasi cukup baik. Artinya jumlah mereka berpotensi membesar jika tidak ada respon atau disikapi secara baik dan benar oleh para pengambil kebijakan.

Kedua hasil penelitian dari Setara Institute dan SMRC, seolah memperkuat dari hasil survey LaKIP (Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian) tahun 2010 tentang Radikalisme di kalangan siswa SMA. Berdasarkan penelitian LaKIP, ditemukan bahwa sebagian besar siswa SMA dan guru setuju dengan tindakan intoleransi dan sikap radikalisme. Dalam kasus radikalisme, misalnya, untuk tingkat pengenalan dan kesetujuan terhadap organisasi radikal, rata-rata persentase guru dan siswa masing-masing 66,4 persen dan 26,7 persen (pengenalan) serta 23,6 persen dan 12,1 persen (kesetujuan). Untuk tingkat pengenalan dan kesetujuan terhadap tokoh-tokoh radikal, rata-rata persentase guru dan siswa: 69,2 persen dan 26,6 persen (pengenalan) serta 23,8 persen dan 13,4 persen (kesetujuan). Dari temuan LaKIP itu, jelas sekali guru dan siswa di Jabodetabek mengenal organisasi dan tokoh radikal serta sebagian dari mereka menyetujui tindakan organisasi dan tokoh tersebut.

Radikalisme erat kaitannya dengan sikap intoleransi. Betapa tidak, laporan survey LaKIP menunjukkan; 62,7 persen guru dan 40,7 persen siswa menolak berdirinya tempat ibadah non-Islam di lingkungan mereka. Guru (57,1 persen) dan siswa (36,9 persen) juga menolak bertoleransi dalam perayaan keagamaan di lingkungan mereka. Lebih jauh lagi, dari hasil survei itu juga ditemukan fakta yang menarik: 21,1 persen guru dan 25,8 persen siswa menganggap Pancasila tidak lagi relevan sebagai ideologi negara. Guru dan siswa pun menganggap persoalan bangsa akan teratasi bila syariat Islam diterapkan di Indonesia (65 persen)<sup>29</sup>.

Dalam konteks masyarakat, perilaku intoleransi dan radikalisme juga banyak dilakukan oleh warga. Hasil penelitian Wahid Institute tahun 2011, memperlihatkan bahwa kondisi kebebasan beragama dan perilaku intoleransi sudah memperlihatkan lampu merah yang berarti sangat

---

<sup>29</sup> Laporan LaKIP sebagaimana dimuat dalam Koran Tempo, 29/4/2011

membahayakan dan harus dihentikan. Perilaku intoleransi dan tindakan kekerasan tidak hanya dilakukan oleh warga masyarakat, tapi juga dilakukan oleh negara melalui aparturnya. Perilaku intoleransi banyak terjadi karena perbedaan agama dan keyakinan. Hasil temuan Wahid Institute memperlihatkan bahwa larangan/pembatasan ibadah menempati urutan tertinggi (49%) yang dilakukan oleh aparat pemerintah melalui larangan resmi ataupun surat edaran, seperti dalam kasus Ahmadiyah di Bogor dan Pandeglang, Gereja GKI Yasmin di Bogor dan lainnya. Dari 15 provinsi yang diteliti, Jawa Barat menempati urutan pertama sebagai daerah yang dianggap tidak toleran<sup>30</sup>.

Dari beberapa hasil studi di atas, dapat kita simpulkan bahwa penelitian yang terkait pendidikan kebinekaan atau multikultural, lebih banyak terjadi pada level kelas dan sekolah, dan itu menyangkut proses pembelajaran kelas, serta budaya sekolah. Studi ini lebih melihat dari sisi praktis dan teknis, tidak melihat pada aspek meso (lingkungan sosial, masyarakat, dan kebijakan politik lokal). Sedangkan studi yang terkait multikultural berupa perilaku siswa di luar sekolah yang cenderung bersikap anti multikultural, memperlihatkan gejala yang negatif (intoleran, pro radikalisme dan kekerasan). Seperti pada hasil studinya Setara Institute dan SMRC, meskipun secara persentase kecil, tapi tetap menjadi *warning* karena potensi untuk membesar. Kedua hasil studi di atas memiliki kesamaan pola, yaitu melihat dari sisi hilir tidak melihat pada aspek hulunya. Posisi penelitian pendidikan kebinekaan yang sekarang akan dilakukan, untuk melengkapi beberapa hasil penelitian, tidak hanya pada aspek teknis dan praktis, tapi juga dari sisi regulasi (kebijakan) baik pada level meso maupun pada tingkat makro (kebijakan daerah). Diharapkan hasil penelitian ini bisa merekomendasikan kebijakan yang lebih komprehensif tentang pelaksanaan pendidikan kebinekaan dilihat dari berbagai aspek yang ada.

---

<sup>30</sup> Baca Lampu Merah Kebebasan Beragama di Indonesia, Laporan Wahid Institute tentang Kebebasan Beragama dan Toleransi tahun 2011

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative method*) dengan maksud untuk menemukan praktik terbaik (*best practices*) penyelenggaraan pendidikan kebinekaan di sekolah dan hubungannya dengan masyarakat sekitarnya. Selain praktik baik, juga dianalisis kendala pelaksanaan pendidikan kebinekaan, dan solusi untuk mengatasi kendala tersebut.

#### **B. Fokus, Lokus dan Waktu Pelaksanaan Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada pengalaman yang dilakukan sekolah dalam mengelola pendidikan kebinekaan baik melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Secara rinci fokus kajian diarahkan pada upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya yaitu:

1. Bagaimanakah kebijakan sekolah dalam mengelola kebinekaan di lingkungan sekolahnya? (bagaimana visi, misi, kebiasaan, aturan, program, dan kegiatan sekolah?)
2. Nilai-nilai kebinekaan/multikultural apa saja yang diterapkan sekolah dalam membentuk karakter siswa di sekolah? (bagaimana penerapan toleransi, tidak diskriminatif, adil, nasionalisme, kerjasama, menghargai, kepercayaan, nilai kerukunan, nilai perdamaian?)
3. Bagaimanakah guru menanamkan nilai-nilai kebinekaan kepada siswa dalam pembelajaran di kelas? (bagaimana metode pembelajaran, kurikulum, sarana prasarana, dan silabi?)

4. Bagaimanakah peran stakeholder (bagaimana peran alumni, komite sekolah, orang tua dan lainnya?) dalam pengembangan pendidikan kebinekaan di sekolah?
5. Bagaimanakah peran dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan pendidikan kebinekaan di sekolah?

Penelitian ini memilih lokus yang memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Keterwakilan lokasi di dalam Jawa dan luar Jawa;
2. Lokasi yang memiliki karakteristik masyarakat yang beragam, antara lain dari aspek agama, dan etnis;
3. Memiliki tingkat toleransi yang tinggi, berdasarkan hasil survey yang dirilis salah satu lembaga survey, kedua kota tersebut masuk dalam kategori sangat toleran.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka dipilih 2 (dua) lokasi penelitian, yaitu: (1) Kota Singkawang yang mewakili wilayah luar Jawa; dan (2) Kota Salatiga, mewakili wilayah dalam Jawa. Sementara itu untuk waktu pelaksanaan, penelitian ini dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, mulai bulan Mei s.d. Oktober 2016.

### **C. Subjek dan Informan Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah sekolah menengah beserta komponen warga yang ada di dalamnya terutama siswa, guru, dan kepala sekolah. Alasan memilih jenjang SMA sebagai unit analisis karena pada jenjang sekolah menengah khususnya siswa SMA berada pada posisi transisi, relatif labil sehingga mudah dipengaruhi oleh paham-paham tertentu. Oleh karena itu perlu untuk mengetahui sejauhmana pengetahuan, pemahaman dan penerapan nilai-nilai kebinekaan di kalangan siswa SMA.

Hasil penelitian ini selain untuk memberikan rekomendasi kebijakan pada jenjang pendidikan menengah, juga secara tidak langsung dapat melakukan perbaikan pendidikan kebinekaan pada jenjang di bawahnya (SMP, SD) berdasarkan hasil pembelajaran dari jenjang sekolah menengah.

Adapun kategori siswa yang dipilih adalah siswa kelas 2 SMA Negeri dan/atau Swasta, bukan sekolah keagamaan, alasannya karena sekolah SMA negeri/swasta dianggap lebih majemuk (plural) dari sisi keagamaan, etnis dan lainnya.

Informan lain adalah guru yang mengajarkan matapelajaran terkait pendidikan kebinekaan, terutama guru pendidikan Agama, dan guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Guru-guru ini memiliki peran sangat vital dalam pembentukan dan penguatan karakter siswa termasuk menjaga dan memelihara kebinekaan.

Kepala sekolah tentunya memiliki peran sangat menentukan dalam mengelola sekolah dan memelihara hubungan antar-warga di dalamnya. Oleh karena itu, kepada kepala sekolah akan ditanyakan dan didiskusikan antara lain kebijakan dan program terkait penerapan pendidikan kebinekaan di sekolah yang dikelolanya.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Data dan informasi penelitian dikumpulkan dengan beragam cara (*multy-methods*) seperti *desk review*, wawancara mendalam, dan observasi. Berikut tabel teknik dan sumber data penelitian.

**Tabel 3.1** Teknik dan Sumber Data Penelitian

| Variabel Data             | Teknik Pengumpulan data |               |           | Sumber data |                       |
|---------------------------|-------------------------|---------------|-----------|-------------|-----------------------|
|                           | Wawancara               | Studi dokumen | Observasi | Informan    | Dokumen               |
| Nilai nilai multikultural | Indepth interview       | Studi dokumen | -         | Guru MGMP   | Buku mapel<br>Dokumen |

| Variabel Data                                     | Teknik Pengumpulan data |               |                                              | Sumber data                                                         |                                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                   | Wawancara               | Studi dokumen | Observasi                                    | Informan                                                            | Dokumen                                       |
| di sekolah                                        |                         |               |                                              |                                                                     | silabus, RPP                                  |
| Kapasitas guru dalam pembelajaran di kelas        | Indepth interview       | -             | Praktek belajar di kelas                     | -                                                                   | -                                             |
| Kurikulum pendidikan sekolah                      | Indepth interview       | Studi dokumen |                                              | Guru MGMP                                                           | Buku Mapel, silabus, RPP                      |
| Visi dan komitmen sekolah                         | Indepth interview       | -             | Peraturan, tata tertib dan kebiasaan sekolah | 1. Kepala sekolah<br>2. Ketua komite sekolah<br>3. Pengurus yayasan | AD ART<br>Peraturan Sekolah<br>Profil sekolah |
| Budaya sekolah                                    | Indepth interview       | -             | -                                            | 1. Kepala sekolah<br>2. Ketua komite sekolah<br>3. Pengurus yayasan |                                               |
| Faktor yang mempengaruhi pendidikan multikultural | Indepth interview       | -             | Observasi                                    | 1. Kepala sekolah<br>2. Guru<br>3. Komite sekolah                   | -                                             |
| Kebijakan pemerintah daerah                       | Indepth interview       | Studi dokumen | Observasi                                    | Dinas Pendidikan                                                    | Perda<br>SK Bupati<br>Dll                     |
| Dukungan masyarakat                               | Indepth interview       | Studi dokumen | Observasi                                    | 1. Komite sekolah                                                   | Notulen rapat                                 |

| Variabel Data | Teknik Pengumpulan data |               |           | Sumber data                       |            |
|---------------|-------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------|------------|
|               | Wawancara               | Studi dokumen | Observasi | Informan                          | Dokumen    |
|               |                         |               |           | . Tokoh masyarakat<br>. LSM/Ormas | MOU<br>DII |

**Tabel: 3.2 Operasionalisasi Konsep**

**Aspek, Variabel dan Indikator**

| Aspek       | Variabel                                                    | Sub Variabel                                                                                                         | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Level mikro | Nilai-nilai Multikultural dalam pelajaran di sekolah        | . Nilai toleransi<br>. Nilai demokrasi<br>. Nilai tentang HAM<br>. Nilai kebebasan<br>. Nilai kemajemukan            | . Siswa mengetahui dan memahami nilai-nilai multikultural<br>. Siswa mempraktikkan nilai-nilai multikultural dalam kehidupan sosial di sekolahnya                                                                                                                                                                             |
|             | Kapasitas Guru dalam model pembelajaran nilai multikultural | . Pengetahuan dan pemahaman guru tentang nilai multikultural<br>. Metode guru dalam pembelajaran nilai multikultural | . Pengetahuan dan pemahaman guru tentang aspek teori, histori, dasar hukum dalam pembelajaran nilai multikultural<br>. Kemampuan guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran (silabus, RPP)<br>. Metode guru dalam menyampaikan materi nilai multikultural<br>. Metode guru dalam evaluasi pembelajaran materi multikultural |
|             | Kurikulum Pendidikan                                        | . Nilai multikultural pada buku pelajaran                                                                            | . Jenis-jenis nilai multikultural yang ada dalam buku                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Aspek      | Variabel                                                                            | Sub Variabel                                                                                                                                                                                                                      | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | dalam pengembangan nilai multikultural                                              | <p>pendidikan Agama, PPKn, IPS</p> <p>. Metode penyampaian nilai multikultural pada buku pelajaran Agama, PPKn, IPS</p> <p>. Metode evaluasi pembelajaran nilai multikultural pada pelajaran pendidikan Agama, PKn dan IPS</p>    | <p>pelajaran PKn, Pendidikan Agama dan IPS</p> <p>. Bentuk metode pembelajaran nilai multikultural dalam buku pelajaran</p> <p>. Bentuk metode evaluasi pembelajaran dalam nilai multikultural dalam buku pelajaran agama, PKn dan IPS</p>                                                                              |
| Level meso | Visi dan komitmen sekolah dalam mendukung pengembangan nilai multikultural          | <p>. Visi misi sekolah yang mendukung nilai multikultural</p> <p>. Kebijakan kepala sekolah terhadap pengembangan nilai multikultural</p> <p>. Dukungan dari komite sekolah</p>                                                   | <p>. Adanya visi misi sekolah yang mendukung kehidupan multikultural</p> <p>. Adanya kebijakan kepala sekolah yang pro multikultural</p> <p>. Dukungan komite sekolah terhadap nilai multikultural</p>                                                                                                                  |
|            | Budaya sekolah yang mendukung pendidikan multikultural ( <i>hidden curriculum</i> ) | <p>. Tata tertib sekolah tentang kebiasaan murid sebelum dan setelah proses pembelajaran</p> <p>. Kegiatan ekstra dan intra sekolah yang dikembangkan sekolah</p> <p>. Kebijakan sekolah terkait kegiatan perayaan hari besar</p> | <p>. Adanya aturan atau tata tertib sekolah yang tidak diskriminatif, yang dilakukan siswa sebelum, selama dan setelah kegiatan pembelajaran</p> <p>. Adanya kegiatan ekstrakurikuler dan intra kurikuler oleh sekolah kepada siswa yang bisa mendukung pengembangan nilai multikultural</p> <p>. Kebijakan sekolah</p> |

| Aspek       | Variabel                                                                       | Sub Variabel                                                                                                                                                                                                     | Indikator                                                                                                                                                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                | agama                                                                                                                                                                                                            | memberikan kesempatan yang sama kepada siswa untuk melaksanakan ajaran agamanya secara adil dan tidak diskriminatif                                                           |
|             | Faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan nilai multikultural                 | . Faktor internal<br>. Faktor eksternal                                                                                                                                                                          | . Faktor internal; lingkungan, keluarga, bahan bacaan, pengalaman masa kecil<br>. Faktor eksternal; kebiasaan di masyarakat, nilai budaya kearifan lokal                      |
| Level makro | Bentuk dukungan masyarakat sipil dalam mendorong penanaman nilai multikultural | . Dukungan masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang mendukung nilai multikultural dalam kehidupan sekolah dan masyarakat<br>. Dukungan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan implementasi nilai multikultural | Penerimaan masyarakat terhadap kebijakan lokal (isi, sanksi)<br>Dukungan masyarakat untuk melaksanakan kebijakan<br>Dukungan masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan |
|             | Regulasi/ kebijakan pemerintah daerah (Perda) untuk kehidupan multikultural    | Adanya kebijakan lokal (Perda) yang berpengaruh (mendukung/tidak mendukung) terhadap kehidupan kebinekaan                                                                                                        | Bentuk kebijakan<br>Isi kebijakan<br>Efektifitas kebijakan<br>Keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan                                                               |

## E. Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan melalui analisis *deskriptif naratif-kualitatif*. Kegiatan analisis mencakup analisis konten (*content analysis*) pada sejumlah dokumen, peraturan, silabus, dan RPP menjadi sumber data. Hasil penelusuran data lapangan baik melalui *indepth interview*,

observasi, dilakukan pemetaan, pengelompokkan secara tematik serta dianalisis untuk memperoleh jawaban penelitian. Langkah-langkah analisis dan pengolahan data secara spesifik mengadopsi teknik analisis penelitian kualitatif melalui tahap 1) penelaahan data, 2) penyortiran (reduksi), 3) pengelompokkan data, 4) pemeriksaan keabsahan data.

## **BAB IV**

### **PENDIDIKAN KEBINEKAAN DI KOTA SINGKAWANG**

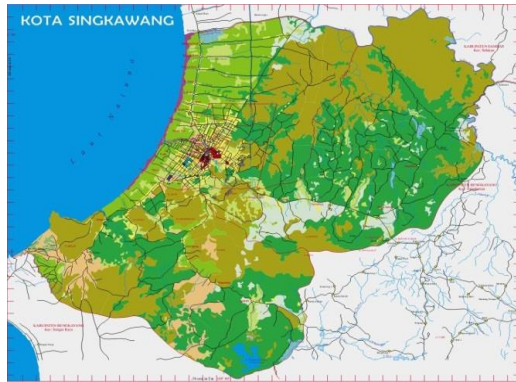
#### **A. Gambaran Umum Kota Singkawang**

##### **1. Letak Geografis**

Kota Singkawang berjarak  $\pm 147$  km dari Kota Pontianak, ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Secara administratif Kota Singkawang terbagi ke dalam 5 (lima) kecamatan:

Singkawang Tengah, Timur, Barat, Utara, dan Selatan dengan 26 kelurahan.<sup>31</sup>

Kehidupan masyarakat Kota Singkawang yang multi etnis terdiri dari 3 (tiga) etnis terbesar yakni Tionghoa, Melayu dan Dayak ditambah suku-suku lainnya yang hidup secara berdampingan dan harmonis, memberikan warna tersendiri dalam kehidupan sehari-hari. Keanekaragaman etnis dan budaya ini memberikan ciri dan daya tarik tersendiri bagi Kota Singkawang.



Peta Kota Singkawang  
(Sumber: <http://www.singkawangkota.go.id/>)

##### **2. Komposisi Penduduk**

Sebagian besar penduduk Kota Singkawang beragama Budha yang kebanyakan dianut oleh penduduk dari etnis Tionghoa. Umat Budha ini tersebar di seluruh kecamatan, terbanyak berada di Kecamatan Singkawang Barat dan Selatan. Penduduk beragama Islam merupakan yang terbesar kedua, juga tersebar di lima kecamatan, terbanyak berada di Kecamatan Singkawang Tengah. Menyusul di urutan ketiga dan keempat masing-masing penduduk beragama Katolik dan Protestan yang

---

<sup>31</sup> Data diperoleh dari <http://www.singkawangkota.go.id/> dan sumber lain yang relevan.

umumnya berada merata di Kecamatan Timur, Tengah, Barat dan Selatan. Penduduk beragama Hindu merupakan jumlah penganut agama terkecil tersebar di empat kecamatan yaitu Kecamatan Singkawang Tengah, Singkawang Barat, Singkawang Utara dan Singkawang Selatan.

**Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Kota Singkawang  
Menurut Agama, 2009**

| No.             | NAMA KELURAHAN     | JUMLAH PENDUDUK BERAGAMA |         |           |       |        |         |
|-----------------|--------------------|--------------------------|---------|-----------|-------|--------|---------|
|                 |                    | Islam                    | Katolik | Protestan | Hindu | Budha  | Lainnya |
| 1               | Singkawang Tengah  | 25.941                   | 3.384   | 4.657     | 5     | 18.631 | -       |
| 2               | Singkawang Timur   | 4.592                    | 6.334   | 2.743     | 5     | 3.905  | -       |
| 3               | Singkawang Barat   | 17.722                   | 3.724   | 2.346     | 42    | 30.403 | 645     |
| 4               | Singkawang Utara   | 16.821                   | 79      | 138       | 4     | 3.652  | -       |
| 5               | Singkawang Selatan | 10.910                   | 3.341   | 2.586     | 300   | 22.077 | -       |
| KOTA SINGKAWANG |                    | 75.986                   | 16.862  | 12.470    | 356   | 78.668 | 645     |

Sumber: Dinas Sosial Kota Singkawang 2009

Secara kesukuan, penduduk Kota Singkawang juga cukup heterogen. Terdapat 5 etnis utama yang hidup berdampingan selama bertahun-tahun yaitu Melayu, Tionghoa, Jawa, Bugis, dan Dayak, di samping juga beberapa etnis lain seperti Minang, Batak, Sunda dan lain-lain. Etnis terbesar di Kota Singkawang adalah Tionghoa yang meliputi hampir 40% dari penduduk kota, tersebar di lima kecamatan terutama di Kecamatan Singkawang Barat dan Singkawang Selatan. Melayu merupakan etnis terbesar kedua, tersebar di lima kecamatan terutama di Kecamatan Singkawang Barat, Singkawang Tengah dan Utara.

Populasi penduduk Kota Singkawang setiap tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan data Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang pada tahun 2011, tercatat sebanyak 246.306 jiwa, mayoritas penduduk adalah orang Hakka/Khek sekitar 42% dan selebihnya orang Melayu, Dayak, Tio Ciu, Jawa dan pendatang lainnya. Penduduk di kota ini tersebar di lima kecamatan, yakni Singkawang

Selatan, Singkawang Timur, Singkawang Utara, Singkawang Barat dan Singkawang Tengah. Dari lima daerah ini terdapat 26 kelurahan.

Untuk Singkawang Selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang pada 2006 terdapat 37.396 jiwa. Tahun berikutnya 2007 bertambah menjadi 40.708 jiwa dan pada tahun 2008 yang lalu ada 41.466 jiwa. Di Singkawang Timur pada 2006 terdapat 18.951 jiwa dan tahun 2007 menjadi 19.022 jiwa. Jumlah itu naik menjadi 19.054 jiwa pada tahun 2008. Singkawang Utara tahun 2006 terdapat 20.287 jiwa. Pada tahun berikutnya, yaitu 2007 dihuni oleh 21.160 jiwa.

Peningkatan terjadi lagi pada tahun 2008 menjadi 21.401 jiwa. Wilayah Singkawang Barat tahun 2006 silam tercatat 59.534 penduduk. Jumlah tersebut naik secara signifikan pada 2007 menjadi 60.307 jiwa. Pada 2008 sebanyak 60.656 jiwa hidup di Singkawang. Terakhir di Singkawang Tengah tahun 2006 ada 52.132 jiwa. Sedangkan tahun 2007 terdapat 55.882 jiwa. Jumlah yang signifikan terjadi pada 2008 menjadi 56.330 orang. Laju pertumbuhan penduduk Kota Singkawang pada tahun 2006 sekitar 5,6 persen. Kesemua penduduk itu tersebar di wilayah Kota Singkawang yang memiliki luas 504,00 km<sup>2</sup>.

**Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Kota Singkawang  
Menurut Suku/Etnis, 2009**

| NO              | KELURAHAN          | JUMLAH PENDUDUK SUKU |          |       |        |       |       |         |
|-----------------|--------------------|----------------------|----------|-------|--------|-------|-------|---------|
|                 |                    | Melayu               | Tionghoa | Dayak | Madura | Bugis | Jawa  | Lainnya |
| 1               | Singkawang Tengah  | 17.420               | 18.631   | 0     | 7.815  | 0     | 0     | 8.752   |
| 2               | Singkawang Timur   | 2.907                | 4.693    | 7.550 | 0      | 0     | 0     | 3.445   |
| 3               | Singkawang Barat   | 0                    | 30.403   | 0     | 0      | 0     | 0     | 0       |
| 4               | Singkawang Utara   | 3.690                | 2.880    | 20    | 0      | 0     | 193   | 146     |
| 5               | Singkawang Selatan | 3.967                | 22.814   | 0     | 2.579  | 1.140 | 2.714 | 5.996   |
| KOTA SINGKAWANG |                    | 27.984               | 79.421   | 7.570 | 10.394 | 1.140 | 2.907 | 18.339  |

Sumber: Dinas Sosial Kota Singkawang 2009

### **3. Kehidupan Sosial Budaya**

Kehidupan masyarakat Kota Singkawang yang multi etnis terdiri dari 3 (tiga) etnis terbesar yakni Tionghoa, Melayu dan Dayak ditambah suku-suku lainnya yang hidup secara berdampingan dan harmonis, memberikan warna tersendiri dalam kehidupan sehari-hari. Keanekaragaman etnis dan budaya ini memberikan ciri dan daya tarik tersendiri bagi Kota Singkawang. Terdapat berbagai peristiwa budaya yang dapat dinikmati dari masing-masing etnis yang ada. Peristiwa budaya tersebut biasanya dirayakan dan diperingati bersamaan dengan upacara hari besar keagamaan. Terdapat berbagai peristiwa budaya yang dapat dinikmati dari masing-masing etnis yang ada. Peristiwa budaya tersebut biasanya dirayakan dan diperingati bersamaan dengan upacara hari besar keagamaan.

### **B. Pendidikan Kebinekaan di Kota Singkawang**

#### **1. Kebijakan Sekolah dalam Menerapkan Nilai-Nilai Kebinekaan/Multikulturalisme<sup>32</sup>**

Implementasi kebijakan sekolah berdasar visi dan misi diwujudkan dalam berbagai bentuk pembiasaan, program, dan kegiatan. Contoh praktik baik ditemukan di SMAN 7 Singkawang, yaitu dengan memperkenalkan keadaan siswa berkaitan dengan banyaknya perbedaan secara agama/keyakinan, adat istiadat, suku, dan bahasa. Pemahaman tentang keberagaman tersebut tertuang dalam program keagamaan, bagi siswa yang menganut agama, seperti Katholik mengadakan Natal bersama, sementara Muslim dengan acara maulidan. Untuk menjaga suasana yang tetap kondusif, kepala sekolah selalu menyampaikan pesan tentang pentingnya toleransi dan kebinekaan di saat upacara bendera. Pihak sekolah juga menerapkan budaya nasional, yakni tidak menunjukkan dominasi salah satu agama tertentu, tercermin dalam setiap pembacaan doa, di mana siswa berdoa sesuai dengan tata cara agama yang dianut masing-masing siswa. Untuk kegiatan ekstrakurikuler, pihak sekolah memprogramkan tarian tiga etnis, dengan

---

<sup>32</sup> Sumber data: profil sekolah & hasil wawancara dengan Kepsek

nama "Cidayu" (Cina, Dayak, dan Melayu) dengan harapan siswa akan lebih mengenal budaya dari etnis dan agama lain.

Implementasi kebijakan sekolah yang dapat dikategorikan sebagai praktik baik juga ditemukan di SMKN 2 Singkawang. Komposisi siswa menurut etnis didominasi oleh mayoritas Tionghoa (65%), selebihnya etnis Dayak, Melayu, Jawa, Bugis, dan Madura. Komposisi tersebut juga dapat memberikan gambaran tentang komposisi menurut agama dan budaya yang dianut siswa yang mayoritas Budha dengan adat istiadat khas Tionghoa. Untuk menjaga kerukunan antar etnis, agama, dan budaya, pihak sekolah melakukan proses pembauran kelompok siswa seperti dalam pemilihan jurusan dan kelompok belajar/tugas. Selain itu pihak sekolah juga memperbanyak kegiatan ekstrakurikuler yang dapat digunakan oleh warga sekolah sebagai ajang anak-anak berkumpul antar etnis. Untuk perayaan agama dan budaya yang memerlukan waktu libur tambahan, pihak sekolah juga memberikan ruang gerak untuk mengaktualisasikan keyakinan agamanya (bagi siswa Tionghoa diberikan kesempatan untuk libur Imlek sekitar 4 hari libur).

## **2. Nilai-nilai Kebinekaan yang Dikembangkan di Sekolah**

Nilai-nilai kebinekaan yang dikembangkan di sekolah tercermin dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler serta kegiatan tidak terstruktur dan tidak terstruktur lainnya.

Nilai-nilai kebinekaan yang dikembangkan di SMAN 7 Singkawang terakumulasi dalam sejumlah bentuk kegiatan intrakurikuler yang bersumber dari matapelajaran agama. Pada saat mengikuti pelajaran agama di kelas, pihak sekolah berupaya untuk memberi pelajaran agama dalam kelompok sesuai agamanya masing-masing dan diajar oleh guru yang seagama. Di SMAN 7 Singkawang yang mayoritas siswanya beragama Katholik, siswa beragama Budha yang berjumlah sedikit mengikuti pelajaran agama Katholik. Namun, dalam hal ritual, mereka bergabung dengan sekolah yang memiliki siswa dan guru yang beragama Budha. Nilai-nilai toleransi juga mendapat perhatian pihak sekolah, ditanamkan dalam pola pembiasaan saling menerima dan tidak

saling mengganggu karena adanya perbedaan. Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah kegiatan ekstrakurikuler (pramuka, paskibra, olahraga, PMR, seni budaya, perayaan agama, festival budaya, ritual, kegiatan sosial, dan lain-lain) sebagai wadah bersilaturahmi antarsiswa.

SMKN 2 Singkawang yang memiliki siswa mayoritas etnis Tionghoa memiliki agenda penumbuhan nasionalisme/nilai-nilai kebangsaan siswa melalui sejumlah kegiatan. Penumbuhan kesadaran nasionalisme dalam kebinekaan tersebut melalui pengenalan simbol-simbol kebangsaan seperti: menghafal sila Pancasila dan menyanyikan lagu Indonesia Raya; pembiasaan menyanyikan lagu wajib nasional, berdoa di awal KBM atau ketika upacara bendera, dan pemberian tugas sebagai petugas upacara bendera secara bergiliran diyakini dapat mempertebal rasa kebangsaan siswa. Penumbuhan nilai-nilai kejujuran dilakukan melalui pengenalan para pahlawan; orang-orang yang berperan secara nyata seperti para atlet; dan mengingatkan kembali lintasan sejarah, keberadaan tempat di mana siswa lahir, tumbuh, dan mati.

Wadah ekstrakurikuler menjadi media positif dalam menumbuhkan kebinekaan dan proses pembauran antar anak dari etnis yang berbeda. Sekolah selalu mengagendakan peringatan hari besar agama masing-masing siswa. Dalam perayaan hari raya keagamaan, sekolah membentuk kepanitiaan kegiatan melibatkan siswa dengan beragam agama/etnis. Selain itu, kerja bakti juga dilakukan secara bergantian untuk membersihkan tempat ibadah dan pemakaman, baik itu agama Katolik, Protestan, Budha, dan Islam.

### **3. Peran Guru dalam Menerapkan Pendidikan Kebinekaan**

Sosok guru sangat berperan dalam penerapan pendidikan kebinekaan kepada siswanya. Hal tersebut dilakukan melalui penanaman nilai-nilai multikulturalisme dalam interaksi antar siswa. Guru mendidik para siswa dengan pola-pola pembiasaan tertentu, seperti menanamkan rasa saling menghargai dan cinta damai baik sebagai makhluk Tuhan maupun warga negara. Dalam melakukan itu, para guru juga menempuh cara yang tidak memicu konflik sosial maupun agama dan memberikan

kesempatan yang sama kepada semua siswa untuk mengekspresikan keyakinan mereka asalkan menjunjung semangat toleransi.

Terkait dengan pola-pola pembiasaan, para guru di Kota Singkawang menumbuhkan budi pekerti melalui pembelajaran etika, sopan santun, pengucapan kata-kata yang sesuai dengan konteks di daerah. Guru di salah satu sekolah juga membiasakan siswa mengucapkan kata “*Good Morning*” sebagai pelaksanaan dari kebijakan penerapan 3S (senyum, sapa, dan salam) di sekolah. Sikap siswa juga tidak luput dari perhatian. Guru menanamkan agar siswa menghormati yang lebih tua, respek kepada guru, kepada teman-teman, rasa memiliki, termasuk juga kebiasaan saling tolong-menolong antar sesama. Untuk tujuan pembauran, siswa dari berbagai agama digabung ke dalam kelompok belajar, sehingga timbul kesadaran bahwa mereka adalah orang Indonesia yang bertanah air satu dan bertumpah darah satu.

#### **4. Kendala Guru dalam Menerapkan Pendidikan Kebinekaan**

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, guru mengalami berbagai kendala dalam menerapkan pendidikan kebinekaan. Kendala-kendala tersebut berkaitan dengan hal yang bersifat teknis dan kultural. Keterbatasan teknis umumnya menyangkut masalah finansial dan sarana. Masalah finansial, misalnya, diyakini sebagai penyebab kurangnya kegiatan kesiswaan yang dapat dilakukan secara rutin di sekolah, termasuk kegiatan peringatan hari besar agama. Kekurangan tersebut mengakibatkan sejumlah kegiatan dipersingkat waktunya dan pendanaanya ditunjang dari sumber lain. Tak jarang, kegiatan tersebut dibantu oleh dana OSIS atau bahkan dalam perayaan tertentu siswa harus mengeluarkan biaya sendiri. Keterbatasan finansial ini juga diperparah oleh keterbatasan gedung dan sarana prasarana penunjang yang dapat digunakan sebagai tempat pertemuan dan pelaksanaan perayaan budaya dan hari besar keagamaan.

Secara kultural, pola pikir yang sudah terbentuk dari pendidikan sebelumnya atau lingkungan keluarga dan masyarakat yang kurang mendukung pembauran juga menjadi kendala dalam upaya pematangan karakter siswa terhadap penerimaan keberagaman. Di Singkawang,

kecenderungan untuk memilih-milih teman berdasarkan etnis didukung oleh kebiasaan umum bahwa orang selalu menggunakan bahasa etnis dalam pergaulan sehari-hari, termasuk di lingkungan sekolah. Orang Tionghoa menggunakan bahasa Tionghoa, siswa Melayu menggunakan bahasa Melayu, dan orang Dayak berbahasa Dayak.

## **5. Peran Stakeholder dalam Pengembangan Nilai-nilai Kebinekaan**

Pengembangan pendidikan kebinekaan tidak bisa dilepaskan dari dukungan masyarakat sekitar dan para pemangku kepentingan sekolah lainnya. Sekolah-sekolah di Singkawang cukup beruntung karena banyak program dan kegiatan untuk menanamkan nilai-nilai kebinekaan memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan tersebut.

Praktik baik yang ditemukan, misalnya, dalam hal pembangunan musholla yang terdapat di SMAN 7 Kota Singkawang yang mayoritas siswanya beragama Katholik. Pada saat kunjungan ke sekolah tersebut, Tim Peneliti memperoleh informasi bahwa pembangunan musholla yang berada di lingkungan sekolah sudah dimulai sejak lama, namun kekurangan biaya. Guru-guru di sekolah lalu mengadakan penggalangan dana secara internal, dan sumbangan pun mengalir baik dari guru yang beragama Islam maupun yang beragama non-Islam.

Selain itu, meskipun mayoritas siswa di sekolah tersebut beragama Katholik dan Kristen, namun sekolah sendiri tidak memiliki sarana ibadah yang memadai untuk mereka. Namun, pembangunan sarana ini akhirnya tidak terlalu diperlukan karena masyarakat sekitar sekolah mempersilakan sekolah memanfaatkan gereja yang bersebelahan dengan lokasi sekolah untuk keperluan pembelajaran dan perayaan keagamaan.

Praktik baik di masyarakat sebagai *stakeholder* yang mendukung pendidikan kebinekaan di sekolah diwujudkan dalam bentuk perayaan bersama. Cap Go Meh, perayaan pasca hari raya Imlek dan Gawe/Gawai Dango bagi etnis Dayak merupakan festival budaya terbesar di Singkawang. Perayaan tersebut melibatkan etnis lain dalam berbagai pertunjukkan yang memiliki ciri khas budaya tradisi, menyerap dan berasimilasi dengan budaya lokal. Kolaborasi dua etnis tersebut

melahirkan parade atraksi kesaktian warga Dayak-Tiongkok dalam merayakan atraksi yang diberi nama Pawai Tatung yang mengikuti tradisi Tionghoa yang berbaur dengan budaya Dayak.

## **6. Peran dan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Implementasi Pendidikan Kebinekaan**

Pemerintah daerah sebagai pengelola pendidikan di daerah semestinya mengambil peran dalam pengembangan pendidikan kebinekaan. Peran-peran tersebut bisa bersifat aktif dalam bentuk kebijakan langsung atau pasif dalam bentuk dukungan terhadap kebijakan atau kegiatan yang relevan. Sebagaimana dapat dilihat dari penelitian di Singkawang, meskipun tidak ada kebijakan khusus yang diinisiasi oleh Pemda, namun mereka cukup apresiatif terhadap kegiatan pengembangan pendidikan kebinekaan di daerah. Pemda, misalnya, seringkali memfasilitasi penelitian-penelitian kebinekaan di Singkawang yang dilakukan oleh lembaga-lembaga lain baik pemerintah maupun non-pemerintah seperti Wahid Institute dan Setara Institute. Dinas pendidikan juga mereplikasi model pendidikan karakter yang dikembangkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud di sekolah-sekolah di wilayahnya.

Dukungan terhadap kegiatan pendidikan kebinekaan itu, misalnya, ditunjukkan saat peneliti meminta dinas pendidikan untuk memfasilitasi penyelenggaraan FGD pendidikan kebinekaan. Dinas pendidikan bersedia mengundang peserta FGD yang berasal dari berbagai latar belakang organisasi, etnis, agama, dan profesi. Ketika Tim Peneliti memaparkan hasil temuan sementara pada saat FGD di ruang pertemuan kantor dinas pendidikan semua peserta menyimak dengan seksama. Salah satu narasumber yang mewakili Kepala Dinas yang sehari-harinya menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Menengah memberikan penekanan pada para peserta FGD agar mewaspadai intoleransi dan menjadikan temuan tim peneliti sebagai dasar untuk membuat program tindak lanjut. Pihak dinas pendidikan mendorong sekolah agar melakukan pendataan terhadap siswa dengan latar belakang agama yang gurunya belum disiapkan oleh sekolah. Data tersebut diminta untuk

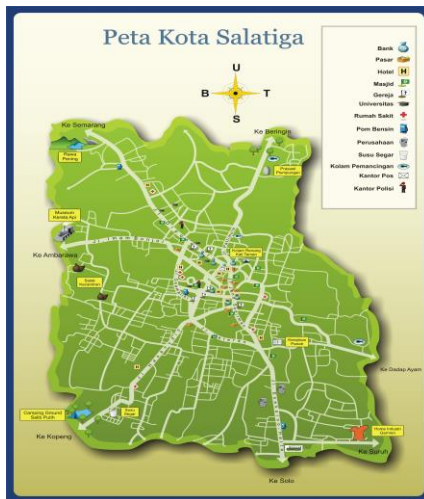
segera diserahkan kepada Kasi Kurikulum untuk ditindaklanjuti dalam rangka penyiapan guru agama yang dibutuhkan.

## BAB V

### PENDIDIKAN KEBINEKAAN DI SALATIGA

#### A. Gambaran Umum Lokasi

##### 1. Kota Salatiga: Lokasi Geografis dan Kondisi Demografi



Secara geografis, Kota Salatiga terletak di cekungan kaki Gunung Merbabu, yang diapit beberapa gunung kecil seperti Gunung Gajah Mungkur, Gunung Telomoyo, Gunung Payung Rong, berada pada ketinggian 450-800 m di atas permukaan laut, dan berhawa sejuk. Kota Salatiga juga dikenal sebagai kota transit atau persinggahan bagi mereka yang

akan melanjutkan perjalanan ke Surakarta (Solo) ataupun ke Yogyakarta.

Secara administratif, Kota Salatiga berbatasan dengan Kabupaten Semarang. Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut: (a) Utara, berbatasan dengan (i) Kecamatan Pabelan yaitu Desa Pabelan, Desa Pejaten; (ii) Kecamatan Tuntang: Desa Kesongo, Desa Watu Agung. (b) Timur, berbatasan dengan (i) Kecamatan Pabelan yaitu Desa Ujung-ujung, Desa Sukoharjo, Desa Glawan; (ii) Kecamatan Tenganan: Desa Bener, Desa Tegalwaton, Desa Nyamat. (c) Selatan, yang berbatasan dengan (i) Kecamatan Getasan: Desa Sumogawe, Desa Samirono, Desa Jetak; (ii) Kecamatan Tenganan: Desa Patemon, Desa Karang Duren. (d) Barat, berbatasan dengan (i) Kecamatan Tuntang yaitu Desa Candirejo, Desa Jombor, Desa Sraten, Desa Gedangan; (ii) Kecamatan Getasan yaitu Desa Polobogo.

Dari komposisi jumlah penduduk dan jumlah penganut agama, berdasarkan data tahun 2014, mayoritas penduduk Kota Salatiga beragama Islam. Selanjutnya secara berturut-turut adalah Kristen, Katholik, Budha, Hindu, Aliran Kepercayaan, dan Konghuchu (lihat Tabel 5.1).

**Tabel 5.1. Komposisi Penduduk Kota Salatiga Berdasarkan Agama**

| No | Agama              | Jumlah  | %      |
|----|--------------------|---------|--------|
| 1  | Islam              | 153.536 | 78,131 |
| 2  | Kristen            | 31.812  | 16,188 |
| 3  | Katholik           | 9.490   | 4,829  |
| 4  | Budha              | 886     | 0,451  |
| 5  | Hindu              | 762     | 0,388  |
| 6  | Konghuchu          | 4       | 0,002  |
| 7  | Aliran kepercayaan | 22      | 0,011  |
|    | Total              | 196.512 | 100    |

Sumber: Salatiga Dalam Angka 2015

## 2. Kota Salatiga dan Semangat Toleransi

Kota Salatiga merupakan salah satu kota kecil di Jawa Tengah yang berada pada posisi perlintasan dan diapit tiga kota besar yaitu Semarang, Surakarta dan Yogyakarta. Berdasarkan hasil riset Setara Insititute pada November 2015, Kota Salatiga ditetapkan sebagai salah satu kota paling toleran di Indonesia, nomor dua setelah kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Predikat Salatiga sebagai kota toleran di Indonesia dibuktikan dengan suasana kehidupan masyarakatnya yang sangat kondusif. Hampir selama ini tidak pernah ditemukan konflik atau kekerasan di masyarakat karena faktor agama.

Simbol toleransi Kota Salatiga di antaranya adalah keberadaan Masjid Agung Darul Amal dan Gereja Katolis Santo Paulus Miki, yang berdekatan dengan Lapangan Pancasila. Lapangan Pancasila pada setiap

hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, digunakan umat Islam untuk melaksanakan Shalat Ied; sedangkan pada saat perayaan Natal dan Hari Raya Paskah, Lapangan Pancasila juga digunakan umat Nasrani untuk merayakan Natal dan Paskah se-kota Salatiga. Pada saat perayaan Natal, pihak Masjid Agung Darul Amal selepas shalat subuh juga tidak membunyikan pengeras suara sebagai bentuk penghormatan kepada saudaranya umat Nasrani yang melakukan ibadah Natal. Para pemuda muslim dan remaja masjid juga ikut membantu kelancaran ibadah Natal dengan mengatur arus lalu lintas. Mereka juga mengucapkan selamat hari raya Natal kepada saudaranya yang beragama Nasrani.<sup>33</sup>



Gambar 5.1. Gereja Santo Paulus dan Ucapan Selamat Puasa Ramadhan

Begitu juga sebaliknya, kehidupan toleransi beragama juga diperlihatkan oleh pihak Gereja Katolik Santau Paulus Miki, dengan memasang spanduk ucapan selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadhan untuk umat Islam. Pihak gereja juga menyediakan

takjil gratis untuk buka puasa bagi umat muslim. Kalangan remaja Nasrani bersama remaja muslim juga menggelar kegiatan sahur bersama pembagian nasi bungkus untuk mereka yang berpuasa.

Kehidupan keagamaan yang sangat toleran dan harmonis ini juga diperkuat dengan keberadaan lembaga pendidikan yang sangat beragam. Kota Salatiga yang juga dijuluki sebagai kota pendidikan, memiliki beberapa perguruan tinggi diantaranya IAIN Salatiga, STIE AMA Salatiga, STIBA Satya Wacana, Sekolah Tinggi Theologi (STT) Salatiga, Akademi Kebidanan (Akbid) Ar-Ruum, Akbid Bhakti Nusantara dan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) yang berdiri sejak tahun 1956. UKSW sebagai bagian dari Kota Salatiga, mendapatkan julukan Indonesia mini karena para mahasiswanya berasal

<sup>33</sup> <http://telusur.metrotvnews.com/news-telusur/zNAvALvb-toleransi-agama-tirulah-salatiga>

dari seluruh pelosok Indonesia. Mahasiswa UKSW juga berasal dari berbagai macam agama, tidak hanya Kristen dan Katolik, tapi juga ada yang beragama Islam, Hindu dan Budha. Mereka bisa hidup aman, tentram dan damai dalam suasana harmoni dan toleransi di antara masyarakatnya yang beragama suku, etnis, budaya dan agama.

Kehidupan toleran di Kota Salatiga bukan hanya terjadi sekarang ini, tapi sudah ada selama ribuan tahun sebelum Indonesia ada. Menurut sejarah, kehidupan toleran di Salatiga telah berusia sekitar 1.265 tahun yang lalu. Usia ini dihitung berdasarkan ulang tahun Kota Salatiga yang berdiri tanggal 24 Juli tahun 750 M sebagaimana tertera dalam Prasasti Plumpungan. Hari lahirnya Kota Salatiga sekaligus meneguhkan usia toleransi di Kota Salatiga. Dalam laporan hasil penelitian dalam rangka peringatan hari lahir Kota Salatiga tahun 1995, disebutkan bahwa dalam Prasasti Plumpungan disebutkan bahwa masyarakat Salatiga pada tahun 750 M sudah menyadari pentingnya agama sebagai landasan hidup untuk sejahtera.

Prasasti Plumpungan dimaknai oleh para ahli dan peneliti hari jadi Kota Salatiga, bahwa tanah bebas pajak yang pada akhirnya menjadi Salatiga ini diberikan oleh raja Bhanu (nama yang tertulis dalam prasasti Plumpungan) karena masyarakat Hampra (Salatiga) dapat menjaga kerukunan antar umat beragama di daerahnya. Hal ini memberikan bukti kepada bahwa sikap toleransi dalam masyarakat Kota Salatiga benihnya sudah tertanam tidak hanya puluhan tahun yang lalu, tetapi ribuan tahun yang lalu, yang pada akhirnya benih toleransi saat itu, kini telah menjadi pohon yang dapat memberikan keteduhan bagi seluruh masyarakat Salatiga yang tinggal di dalamnya.<sup>34</sup>

Dalam versi lain, Prasasti Plumpungan berupa batu besar berjenis andesit berukuran panjang 170 cm, lebar 160 cm dengan garis lingkar 5 meter.

Disebut Prasasti Plumpungan karena prasasti tersebut berada di Dukuh Plumpungan, Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo itu. Berdasarkan prasasti tersebut, maka Salatiga sudah ada sejak tahun 750 Masehi, yang pada saat itu merupakan wilayah Perdikan. Sejarahwan

---

<sup>34</sup> <http://www.kotasalatiga.com/1-265-tahun-hidupnya-toleransi-antar-umat-beragama-di-kota-salatiga/2/>

yang sekaligus ahli Epigraf Dr. J. G. de Casparis mengalihkan tulisan tersebut secara lengkap yang selanjutnya disempurnakan oleh Prof. Dr. R. Ng Poerbatjaraka.

Prasasti Plumpungan berisi ketetapan hukum tentang status tanah perdikan atau swatantra bagi suatu daerah yang ketika itu bernama Hampra, yang kini bernama Salatiga. Pemberian perdikan tersebut merupakan hal yang istimewa pada masa itu oleh seorang raja dan tidak setiap daerah kekuasaan bisa dijadikan daerah Perdikan

Perdikan berarti suatu daerah dalam kerajaan tertentu yang dibebaskan dari segala kewajiban pembayaran pajak atau upeti karena memiliki kekhususan tertentu.

Dasar pemberian daerah perdikan itu diberikan kepada desa atau daerah yang benar-benar berjasa kepada seorang raja. Prasasti yang diperkirakan dibuat pada Jumat, 24 Juli tahun 750 Masehi itu, ditulis oleh seorang Citraleka, yang sekarang dikenal dengan sebutan penulis atau pujangga, dibantu oleh sejumlah pendeta atau resi dan ditulis dalam bahasa Jawa kuno: "**Srir Astu Swasti Prajabyah**" yang berarti "**Semoga Bahagia, Selamatlah Rakyat Sekalian**". Tulisan tersebut yang sekarang digunakan dalam lambang Kota Salatiga.<sup>35</sup>



Gambar 5.2. Prasasti Plumpungan

## **B. Penerapan Pendidikan Kebinekaan Kota Salatiga**

### **1. Kebijakan Sekolah dalam Pengembangan Nilai Kebinekaan**

Pengelolaan nilai-nilai kebinekaan di sekolah, dilakukan secara beragam, diantaranya melalui kurikulum pelajaran seperti dalam pelajaran Pendidikan Agama dan pelajaran PKn. Selain itu juga ada kegiatan kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler. Untuk Kota Salatiga, pengelolaan kebinekaan yang ada di SMA1 Kristen dilakukan

---

<sup>35</sup> <http://www.salatigakota.go.id/TentangLambang.php>

dengan memberikan fasilitas tempat ibadah bagi siswa muslim berupa musholla di lingkungan sekolah. Selain itu, pada hari Jumat, proses kegiatan belajar mengajar juga lebih cepat dari biasanya yaitu pukul 11.15. Hal ini dilakukan untuk menghormati siswa muslim yang akan melaksanakan shalat Jumat.

Demikian juga pada saat bulan Ramadhan, menurut Ibu Kriswinarti, kepala SMA 1 Kristen, sekolah memberikan toleransi kepada siswa muslim untuk boleh datang terlambat, dengan alasannya siswa masih mengantuk sehabis aktivitas sahur dan kegiatan Ramadhan lainnya.

Dari kegiatan ekstrakurikuler, SMA 1 Kristen sangat mendorong siswa untuk lebih memahami semangat dan nilai-nilai kebinekaan melalui berbagai kegiatan yang sifatnya pembauran, lintas etnis dan agama. Untuk kegiatan yang sifatnya lintas agama, sekolah mengadakan beberapa kegiatan perayaan hari besar keagamaan. Seperti kegiatan halal bi halal setelah lebaran, dimana kepanitiannya tidak hanya berasal dari siswa muslim, tapi juga siswa nonmuslim. Demikian juga kalau ada perayaan Natal, atau hari Paskah. Siswa muslim juga ikut bergabung menjadi bagian dari kepanitiaan. Keterlibatan siswa yang berbeda keyakinan lebih kepada hal-hal teknis kegiatan, tapi tidak masuk atau terlibat dalam ritual atau upacara ibadah, sehingga tidak mengganggu keyakinan masing-masing pemeluk agama.



Gambar 5.3. Fasilitas Ruangan Musholla dan Kegiatan Halal Bi Halal di SMA 1 Kristen

Bagi siswa pemeluk agama Konghucu, sekolah memfasilitasi kegiatan perayaan Imlek yang diikuti dengan pertunjukan barongsay. Kegiatan ini bertujuan untuk lebih memperkenalkan keragaman budaya dari tradisi agama Konghucu. Hal ini penting karena agama Konghucu relatif baru menjadi agama resmi dalam 15 tahun terakhir. Dengan perayaan Imlek dan pertunjukan Barongsay, diharapkan siswa lebih bisa mengenal, memahami dan memiliki sikap toleransi dan menghormati perbedaan agama yang ada.

Semangat kebinekaan juga bisa dilihat dari pembauran siswa dari beragam etnis dalam kegiatan belajar ataupun kegiatan ekstrakurikuler. Di SMA 1 Kristen ada beberapa siswa yang berasal dari Papua. Mereka masuk sekolah di SMA 1 Kristen karena mengikuti program dari pusat yaitu program khusus untuk anak-anak Papua yang sekolah di Jawa. Ada beberapa siswa yang sekolah seperti Rivaldi yang berasal dari Nabire. Tidak ada diskriminasi berdasarkan etnis dalam kegiatan belajar. Semua siswa bisa berbaur bersama secara rukun dari berbagai etnis lain. Rivaldi juga sangat cepat bisa beradaptasi dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Pada awalnya memang sempat terjadi kejutan budaya (*shock culture*) karena perbedaan budaya di Nabire Papua dengan budaya masyarakat Kota Salatiga. Akan tetapi setelah melakukan adaptasi dan akulturasi, akhirnya Rivaldi bisa memahami tradisi dan adat istiadat masyarakat Salatiga.

Selain pembauran etnis, sekolah juga mengadakan apresiasi budaya dalam rangka memperkenalkan keragaman dan kekayaan budaya Indonesia. Siswa menggunakan pakaian adat yang ada di seluruh Indonesia. Penggunaan pakaian adat tidak harus dari siswa suku yang sama, tapi juga dari siswa suku yang berbeda. Seorang siswa dari Papua misalnya, bisa mengenakan pakaian adat daerah lain. Hal ini bertujuan agar siswa semakin mengenal dan memahami keragaman etnis suku dan budaya yang ada di Indonesia.

Meski SMA 1 Kristen merupakan sekolah bercirikan keagamaan, akan tetapi siswanya tidak semuanya Kristen. Ada siswanya yang muslim bahkan mencapai 30%. Di sekolah SMA 1 Kristen, siswa muslim tidak mendapatkan pendidikan agama yang sesuai keyakinannya. Karena memang sejak awal sekolah ini sekolah umum, bukan sekolah yang bercorak keagamaan. Pada awal pendaftaran, orangtua siswa juga sudah dijelaskan bahwa tidak ada matapelajaran agama lain di luar pendidikan agama Kristen. Pelajaran agama Kristen yang diajarkan di SMA 1 Kristen, menurut penjelasan ibu kepala sekolah, tidak bermaksud mengajak siswa untuk berpindah agama memeluk agama Kristen. Dalam pelajaran pendidikan agama Kristen, yang lebih banyak ditekankan adalah soal etika dan kasih. Etika dan kasih bersifat universal, lintas iman dan lintas etnik.<sup>36</sup>

Untuk kebijakan sekolah SMAN 1 Salatiga, kebijakan pengelolaan nilai kebinekaan dilakukan melalui pemberian pelajaran agama yang sesuai dengan keyakinan siswa, meskipun hanya satu orang siswa. Hal ini terdapat pada satu orang siswa beragama Budha yang tetap mendapatkan pelajaran agama Budha dari guru yang beragama Budha. Selain itu kepada siswa muslim, sekolah menyediakan sarana ibadah berupa masjid sekolah, sedangkan untuk yang beragama Kristen, sekolah menghubungkannya dengan rumah ibadah yang terdekat dengan lingkungan sekolah. Pada hari Jumat kegiatan pembelajaran selesai pukul 11.25 untuk memberikan kesempatan siswa muslim melaksanakan shalat Jumat di masjid sekolah. Sedangkan siswa Kristen melaksanakan kebaktian di ruangan tersendiri.

---

<sup>36</sup> Hasil Wawancara ibu kriswinarti, kepala sekolah SMA 1 Kristen, 10/8/2016

Keragaman etnik, suku dan agama sangat terlihat di sekolah ini. Siswanya tidak hanya kalangan pribumi tapi juga dari keturunan seperti dari Tionghoa, Arab dan lainnya. Hal ini karena SMAN 1 Salatiga merupakan salah satu SMA terfavorit yang ada di Salatiga. Siswanya beragam dari berbagai strata sosial.

Untuk merayakan kebinekaan bidang kesenian, pihak SMAN 1 Salatiga juga mengadakan festival apresiasi budaya setahun sekali. Festival ini untuk lebih memperkenalkan adat isitadat, kesenian daerah lain. Tujuannya agar siswa memiliki pemahaman, pengetahuan dan pengalaman budaya yang berasal dari daerah-daerah lainnya. Beragam kesenian dari berbagai daerah ditampilkan dalam festival ini seperti kesenian tari Saman dari Aceh, tari piring dari Sumatera Barat, dan lainnya.

Pada saat perayaan kebinekaan dari sisi keberagamaan, pihak SMAN juga memfasilitasi perayaan hari besar keagamaan, seperti perayaan Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, Halal Bi Halal, perayaan Idul Adha untuk siswa muslim, sedangkan untuk siswa Kristen dan Katolik, sekolah memfasilitasi perayaan Natal, Paskah, Kenaikan Isa Almasih, dan lainnya. Dalam perayaan tersebut, siswa juga menampilkan kesenian seperti kesenian rebana untuk peringatan hari besar Islam, atau pentas musik paduan suara untuk acara-acara kerohanian. Kepanitiaan acara peringatan keagamaan dikelola oleh siswa bagian kerohanian. Seperti siswa muslim, mereka memiliki SKI (Sie Kerohanian Islam), siswa Kristen mempunyai PD (Persekutuan Doa). Merekalah yang menyiapkan semua kebutuhan dan perlengkapan acara. Bagi siswa yang beragama Katolik, pihak sekolah memfasilitasi kegiatan kollese, yang dilakukan setiap satu semester. Dalam kegiatan ini, siswa SMAN 1 Salatiga bergabung dengan siswa dari sekolah lain. Demikian juga pada saat perayaan Natal, terkadang juga mengundang siswa sekolah lain.

## **2. Peran Guru dalam Menerapkan Pendidikan Kebinekaan**

Di SMAN 1 Salatiga, upaya yang dilakukan guru dalam menanamkan nilai kebinekaan di antaranya dengan memberikan wawasan kebangsaan dan keanekaragaman (suku, agama, budaya dan

sebagainya) dalam kebinekaan dengan mengajak siswa memberikan penghargaan dan hormat kepada teman berbeda keyakinan (memberikan ucapan selamat hari raya, menghormati tempat ibadah) berpikir positif terhadap peristiwa-peristiwa yang mengarah sikap intoleransi (tidak mencurigai), menjalin kerjasama lewat kegiatan-kegiatan kagamaan (Halal Bi Halal/Idul Adha).

Guru juga berusaha menanamkan nilai kebinekaan melalui contoh atau keteladanan tentang bagaimana menghargai sebuah perbedaan. Selain itu juga dengan menjelaskan hal tersebut tidak hanya di dalam kelas (pada saat jam pelajaran) tapi juga di luar kelas (nonmateri pelajaran), sehingga siswa memiliki pemahaman yang utuh tentang pentingnya nilai kebinekaan dan menghargai perbedaan. Guru juga mengajak siswa untuk berdiskusi tentang agama-agama lain, termasuk juga mencari bahan ajar dari agama lain, sehingga siswa tidak hanya memahami agamanya sendiri tapi juga memahami agama lain. Siswa diharapkan juga mampu berpikir dan bersikap objektif, termasuk dalam memberikan penilaian terhadap agama lain.

Upaya lainnya adalah guru juga mendorong agar siswa aktif dalam kegiatan sekolah, sehingga bisa berinteraksi dan bergaul dengan siswa lain yang berbeda agama, suku dan etnis. Dengan demikian, siswa tahu bagaimana harus bersikap dan bertindak dalam sebuah perbedaan dan keragaman.

Sedangkan di SMA 1 Kristen Salatiga, upaya guru di antaranya melalui penanaman nilai-nilai kasih dan damai dalam pendidikan agama Kristen. Sebagai sekolah Kristen, SMA 1 Kristen mengajarkan materi bahwa semua manusia sama di hadapan Tuhan. Allah mengasihi semua ciptaannya. Orang yang membawa kedamaian menjadi anak-anak Allah. Guru juga mendorong siswa agar bergaul dengan sesama teman sekolah, pembagian kelompok belajar (*peer group*). Dengan keterlibatan siswa aktif dalam berbagai kegiatan bersama temannya yang beragam agama, etnis dan suku, diharapkan mereka bisa belajar arti perbedaan dan menghargai perbedaan tersebut. Dalam aktivitas keagamaan, misalnya dalam doa bersama, siswa Kristen yang memimpin doa, siswa muslim ikut mendukung pembacaan doa sesuai keyakinan yang dianutnya.

Adapun kendala yang dihadapi oleh guru di SMAN 1 Salatiga dan SMA 1 Kristen Salatiga dalam penanaman nilai-nilai kebinekaan di antaranya adalah: (a) masih dominannya media sosial yang kerap mempengaruhi siswa untuk saling menghasut antarsiswa yang beda keyakinan; (b) masih kurang kesadaran siswa tentang keragaman dan perbedaan dalam lingkungan sekolah dan masyarakat; (c) sebagian siswa masih menonjolkan sikap egoisme dan idealisme kesukuan, kedaerahan, dan agama; (d) masih ada siswa yang fanatisme agama, suku, dan kedaerahan sehingga mengisolasi diri dari teman lainnya yang bukan kelompoknya; (e) pengaruh lingkungan yang dialami oleh siswa dalam membentuk kelompok atau komunitas aliran keras atau aliran sesat dan belum terpantau oleh sekolah; (f) masih adanya perbuatan yang dilakukan siswa dalam memaksakan kehendaknya walaupun melanggar aturan yang berlaku di sekolah dan di masyarakat.

Untuk mengatasi kendala di atas, ada beberapa upaya yang dilakukan guru diantaranya:

- a. Melibatkan siswa dalam setiap perayaan keagamaan dan perayaan hari nasional, sehingga siswa terbiasa dalam kerja sama, tolong menolong, saling menghargai, dan saling percaya antara satu dengan yang lainnya.
- b. Melakukan pendekatan individu dan kelompok melalui suatu kegiatan pembinaan atau pelatihan secara rutin di sekolah dalam meningkatkan kemampuan siswa untuk menjadi pemimpin baik pada diri sendiri maupun lingkungan sekolah dan masyarakat dimana pun mereka berada.
- c. Melakukan kegiatan *camp* kerukunan umat beragama sehingga memupuk dan membangun rasa kebersamaan, persaudaraan dan kekompakan di antara mereka walaupun berbeda agama, suku, dan budaya.
- d. Melibatkan siswa dalam kegiatan sosial dan keagamaan untuk melatih mereka memahami penting berdampingan dengan orang lain dan memahami perbedaan dan kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- e. Menumbuhkan kelompok diskusi keagamaan di sekolah dengan melibatkan semua siswa dengan latar belakang yang berbeda baik

agama, suku, dan budaya untuk saling mengenal dan saling memahami di antara mereka, dan berupaya untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan yang mereka alami baik di sekolah maupun lingkungan masyarakat tempat mereka tinggal.

### **3. Peran dan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Implementasi Pendidikan Kebinekaan**

Pengembangan pendidikan kebinekaan juga dilakukan oleh stakeholder terkait termasuk dari lembaga pendidikan tinggi seperti IAIN, Universitas Kristen Satya Wacana, pemerintah daerah dalam hal ini pihak Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta tokoh masyarakat dan tokoh agama. Peran dari pemerintah di antaranya dengan adanya program revitalisasi nilai-nilai Pancasila. Program ini dianggap penting dalam mendukung kebinekaan karena posisi dan peran strategis nilai Pancasila dalam merawat dan menjaga kebinekaan. Pancasila akhir-akhir ini mengalami peminggiran oleh sebagian kelompok masyarakat karena adanya trauma politik masa orde baru. Akan tetapi di sisi lain, Pancasila masih dianggap penting karena bisa menjadi titik temu dan pemersatu bangsa yang beraneka ragam suku, agama, bahasa, budaya dan lainnya.

Pemerintah daerah bekerjasama dengan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) juga menggelar Salatiga Carnival, sebuah *event* apresiasi budaya dalam rangka merayakan kebinekaan. Dipilihnya UKSW karena UKSW mahasiswanya berasal dari berbagai pelosok nusantara. UKSW juga menjadi ikon kebinekaan karena latar belakang mahasiswanya yang sangat beragam. Salatiga Carnival diharapkan bisa mengakomodasi gairah dan semangat warga Salatiga dalam mengelola kebinekaan.

Untuk mengatur kehidupan umat beragama agar tetap harmonis, pemerintah daerah mengaktifkan keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). FKUB ini beranggotaan tokoh masyarakat, tokoh agama dan pimpinan ormas keagamaan, perguruan tinggi, serta unsur dari pemerintah (Kemenag, Kesbangpol, Dinas Sosial, Kejaksaan, Kepolisian dan lainnya). Keberadaan FKUB cukup efektif dalam meminimalisir potensi terjadinya konflik kekerasan atas nama agama,

atau mencegah masuknya efek konflik luar daerah yang akan masuk ke Salatiga.

Beberapa sekolah di Salatiga, tahun lalu dengan dukungan Pemda, mencanangkan Sekolah Wawasan Kebangsaan. Sekolah Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada siswanya dengan memelihara nilai kebinekaan demi kokoh dan tegaknya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Secara simbolik, bentuk sekolah kebangsaan di antaranya melalui penamaan ruang kelas dengan nama-nama pulau di nusantara, penamaan gedung ruangan dengan nama-nama pahlawan. Sekolah mengawali kegiatan belajar mengajar dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan mengakhiri kegiatan belajar dengan lagu-lagu daerah bahkan setiap guru wajib menguasai lagu-lagu daerah.

Sekolah juga mengadakan kegiatan apresiasi budaya melalui lomba-lomba kesenian daerah dan busana daerah, peringatan hari kartini dengan berpakaian tradisional nusantara. Diharapkan siswa tidak hanya tahu dan mengenal seni dan budaya daerah lain, tetapi juga mampu mengapresiasi nilai-nilai budaya yang ada sehingga tumbuh rasa cinta, hormat dan toleransi terhadap kebudayaan nusantara.

Peran *stakeholder* lain dalam penanaman kebinekaan juga dilakukan oleh kalangan guru-guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Menurut Isroi, guru anggota Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PPKn, pendidikan nilai-nilai kebinekaan tidak lepas dari dukungan orang tua di sekolah. Jika orang tua siswa memiliki pandangan dan pemikian kebinekaan, maka akan mudah bagi siswa untuk menerima nilai-nilai kebinekaan. Sebaliknya jika orang tua kurang mendukung pengembangan nilai kebinekaan, maka sulit bagi siswa untuk mau menerima perbedaan dan keragaman. Upaya yang dilakukan oleh guru MGMP PPKn di antaranya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai upaya menanamkan rasa nasionalisme. Dan lagu-lagu daerah di akhir pelajaran. Untuk mengakomodir kearifan lokal, maka ada program Bahasa Jawa setiap minggunya, siswa harus menggunakan Bahasa Jawa dalam percakapan dan cara berpakaian. Hal ini penting karena mereka berada di lingkungan masyarakat Jawa, sehingga tidak mudah tercerabut dari akar tradisi budaya Jawa. Bagi

warga luar Jawa, diharapkan bisa mengapresiasi dan memahami tradisi budaya dan bahasa Jawa.

Pendidikan kebinekaan di sekolah bukan hanya sekedar teori tapi juga praktek. Seperti dalam kegiatan pembagian daging hewan kurban pada setiap Hari Raya Idul Adha. Siswa diajarkan untuk berbagi terhadap sesama, tidak hanya kepada sesama muslim, tapi juga kepada siswa nonmuslim seperti dalam pembagian daging kurban. Demikian juga dengan matapelajaran PAI. Ada siswa SMKN 1 yang nonmuslim, tapi tetap ingin mengikuti pelajaran PAI. Mereka ingin belajar agama Islam. Sebenarnya tidak ada kewajiban bagi siswa tersebut untuk mengikutinya, tapi karena mereka ingin belajar, maka guru tetap memperbolehkannya.

Sedangkan dari pihak kantor Kemenag Kota Salatiga, peran untuk merawat dan menjaga kebinekaan dilakukan melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), di mana dalam forum tersebut berkumpul berbagai tokoh agama yang ada, mereka diajak untuk terlibat menyelesaikan masalah-masalah terkait hubungan antar umat beragama, serta bagaimana menciptakan suasana yang toleran, aman, rukun dan damai di antara pemeluk umat beragama.

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh kalangan dunia pendidikan dan pemerintah dalam mengembangkan penanaman nilai-nilai kebinekaan diantaranya; *Pertama*, serbuan informasi atau berita-berita yang berasal dari dunia sosial media. Berita yang beragam tersebut opininya lebih banyak merugikan dan merusak nilai kebinekaan. Beberapa berita yang di-*share* antar anggota lebih berisikan berita-berita yang diragukan kebenarannya, seperti provokasi kasus kerusuhan di daerah lain, yang kemudian disebar secara cepat dan bercampur dengan opini negatif sehingga bisa mendorong rasa kebencian antara suku, etnis dan pemeluk agama.

*Kedua*, adanya keterbatasan SDM terkait penyediaan guru-guru agama dalam memberikan layanan pendidikan keagamaan sesuai dengan keyakinan siswa dan oleh guru yang seagama, sebagaimana amanah UU Sisdiknas. Di Salatiga misalnya, SMA 1 Kristen tidak memberikan layanan pendidikan agama lain selain pendidikan agama Kristen meskipun siswanya ada yang muslim.

*Ketiga*, masih adanya ujaran dan perasaan kebencian yang ditanamkan kepada siswa karena perbedaan keyakinan agama, terutama oleh sekolah-sekolah yang bercirikan keagamaan.

## **BAB VI**

### **PERSEPSI SISWA SEKOLAH MENENGAH TENTANG PENDIDIKAN KEBINEKAAN DI KOTA SINGKAWANG DAN SALATIGA**

Peserta didik adalah sasaran utama dari pendidikan kebinekaan di sekolah. Keberhasilan pendidikan kebinekaan dapat dilihat dari sejauh mana nilai-nilai multikulturalisme dan pluralisme terinternalisasi dalam diri siswa. Selain itu, sejauh mana lingkungan sekolah telah merepresentasikan penerapan nilai-nilai kebinekaan juga bisa dilihat dari bagaimana para siswa memahaminya. Oleh karena itu, penelitian ini juga memotret persepsi siswa melalui survey. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner survey dibagi menjadi dua, yaitu sikap siswa mengenai implementasi kebinekaan di sekolah dan sikap siswa menyangkut kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat di luar sekolah.

Berdasarkan data hasil survey tersebut, secara umum dapat dikatakan bahwa mayoritas siswa memahami dengan baik nilai-nilai kebinekaan dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun di masyarakat. Selain itu, secara umum bisa pula disimpulkan bahwa para siswa di kedua lokasi penelitian. Meskipun demikian, derajat pemahaman dan penghayatan berbeda-beda antarsiswa sebagaimana tergambarkan melalui jawaban kuesioner. Bahkan, masih terdapat sejumlah siswa yang memiliki sikap yang kontradiktif dengan semangat kebinekaan. Pada bagian ini akan dipaparkan variasi sikap kebinekaan para siswa yang akan dibagi dalam isu-isu yang dianggap penting, yaitu pembelajaran, hubungan pertemanan, kepemimpinan, toleransi, dan kenegaraan.

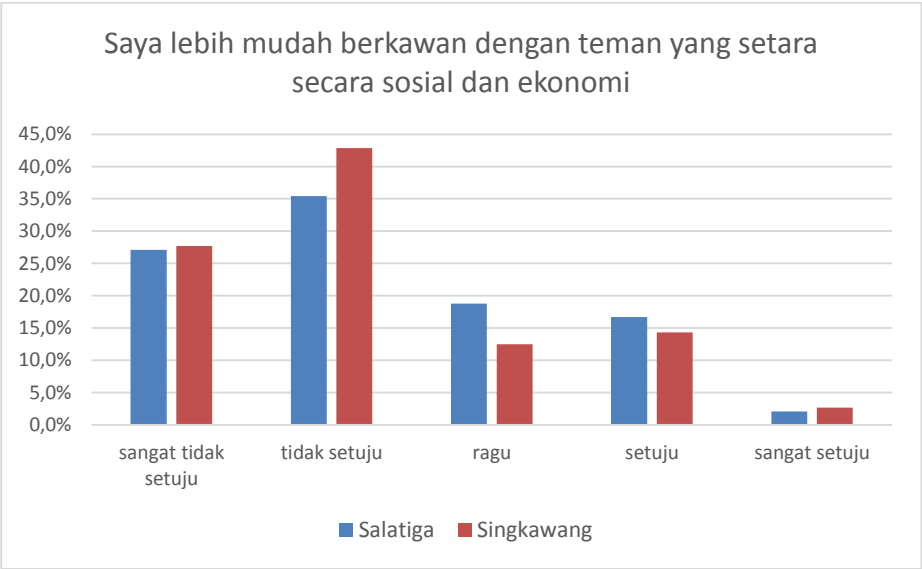
#### **A. Sikap Kebinekaan dalam Hubungan Pertemanan**

Wise dan Velayutham (2009) mengungkapkan bahwa sikap multikultural harus mulai dipupuk melalui pembiasaan dalam cara hidup sehari-hari (*everyday multiculturalism*). Dan, hubungan pertemanan

adalah media paling efektif untuk membentuk sikap multikultural keseharian tersebut. Cara siswa membangun hubungan pertemanan adalah indikator paling mudah untuk melihat sejauh mana nilai-nilai kebinekaan telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Para siswa dapat dikatakan menerapkan semangat kebinekaan jika mereka bersikap inklusif dalam berteman: tidak memilih teman berdasarkan status sosial ekonomi, latar belakang etnis, ataupun latar belakang agama. Prasyarat ini telah dipenuhi oleh sebagian besar siswa yang menjadi responden penelitian di Kota Salatiga dan Singkawang. Ketika ditanyakan apakah mereka lebih mudah berteman dengan teman yang setara secara sosial ekonomi, seagama, dan seetnis sebagian besar memilih opsi sangat tidak setuju dan tidak setuju. Namun demikian, proporsi jawaban tersebut rata-rata kurang dari 70 persen. Hal ini berarti masih terdapat 30 persen lebih siswa yang tidak meyakini sikap kebinekaan dalam hal pertemanan tersebut. Ketidakyakinan itu sendiri berarti dua hal dalam konteks ini: ragu-ragu atau memiliki keyakinan sebaliknya. Menariknya, hal kedua sedikit lebih dominan daripada yang pertama. Ini bermakna potensi anti-kebinekaan masih menjangkiti lebih dari 15 persen siswa di masing-masing kota.

**Grafik 6.1**

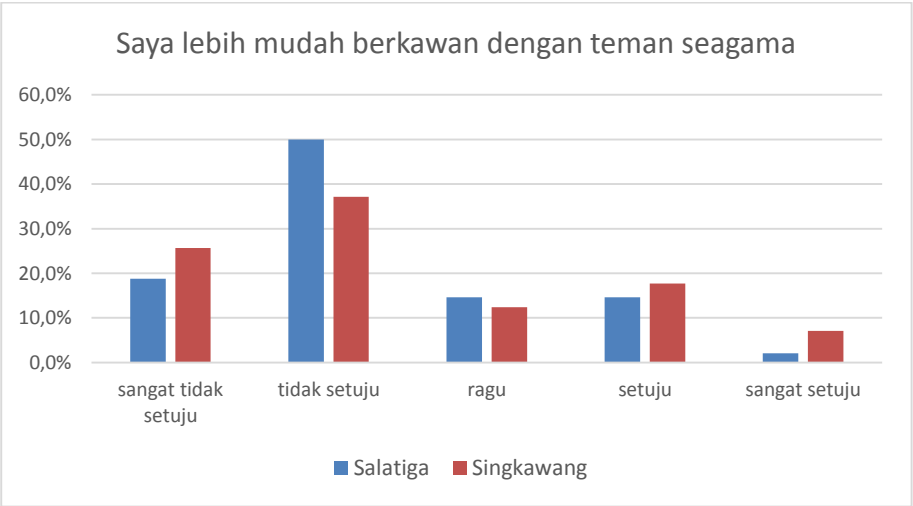
**Memilih Teman Berdasarkan Status Sosial Ekonomi**



Jika perbandingan antarsiswa di kedua kota perlu dibuat menyangkut cara memilih teman ini, maka dapat dikatakan bahwa Kota Salatiga lebih baik dalam sikap kebinekaan dalam hal agama dan etnisitas, sedangkan Kota Singkawang lebih baik dalam sikap kebinekaan secara status sosial ekonomi. Sebagaimana dapat diamati melalui grafik batang di atas, hampir 40 persen siswa di Salatiga mengaku bahwa mereka tidak yakin bahwa mereka lebih mudah berkawan dengan teman yang setara secara sosial ekonomi (lihat Grafik 6.1). Dari jumlah itu, separuhnya bahkan benar-benar merasakan tidak lebih mudah membangun pertemanan dengan teman yang berbeda status sosial ekonominya. Hal ini dapat dijelaskan dari faktor adanya isu kesenjangan sosial ekonomi di Salatiga antara para penduduk asli dan pendatang. Magnet utama para pendatang adalah keberadaan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW). Setiap tahun kampus tersebut memberi beasiswa kepada para pendatang dari daerah Indonesia Timur dan mereka tumbuh, berkeluarga, dan menetap di sana dan membentuk kelompok kelas menengah sendiri.

**Grafik 6.2**

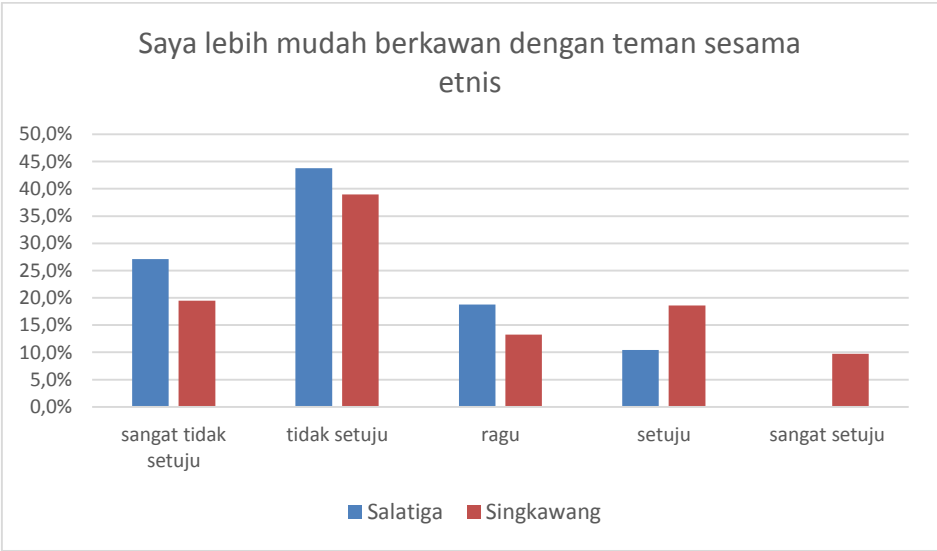
**Memilih Teman Berdasarkan Latar Belakang Agama**



Di Singkawang problem kesenjangan sosial ekonomi, meski ada, tidak setinggi Salatiga karena tidak terdapat institusi sosial ekonomi yang menimbulkan arus pendatang secara reguler. Namun, struktur masyarakat Singkawang yang multikultural dengan komposisi yang relatif berimbang antara etnis Tionghoa, Melayu, dan Dayak membuat potensi masalah dalam hubungan antar etnis dan agama lebih tinggi. Ini terlihat bahwa meskipun sebagian besar siswa di Singkawang (dan juga Salatiga) mengaku bahwa mereka tidak memiliki masalah memilih teman yang berbeda latar belakang etnis dan agama, masih terdapat 30 persen siswa yang memiliki kecenderungan memilih-milih teman berdasarkan etnis dan agama (Grafik 2 dan 3). Pertimbangan etnis dalam memilih teman berkembang secara natural karena anak-anak cenderung menggunakan bahasa etnis mereka dalam pergaulan sehari-hari. Persoalan komunikasi secara alami menciptakan hambatan dalam membangun hubungan pertemanan lintas etnis.

**Grafik 6.3**

**Memilih Teman Berdasarkan Latar Belakang Etnis**

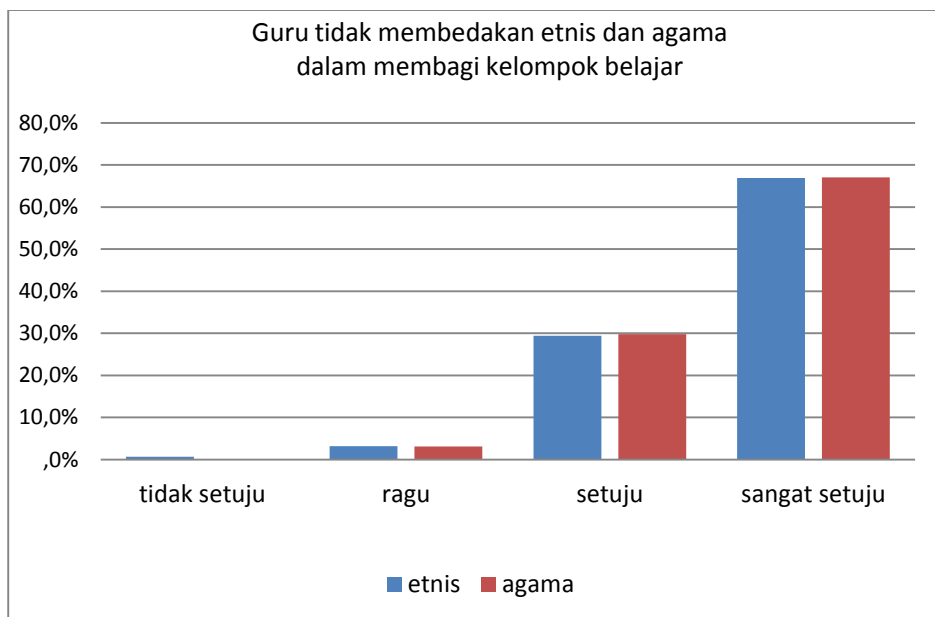


## B. Persepsi Kebinekaan Lingkungan Pembelajaran

Sebagaimana dikemukakan oleh Banks (2002), keberadaan lingkungan pembelajaran yang mendukung adalah pondasi utama pelaksanaan pendidikan kebinekaan di sekolah. Jika lingkungan pembelajaran di sekolah bersifat diskriminatif dan intoleran, maka dapat dipastikan upaya penanaman nilai-nilai keragaman dan kebinekaan tidak bisa berjalan maksimal. Menurut Banks (2002), peran guru sangat penting dalam hal ini. Guru membantu siswa dalam berinteraksi secara efektif dengan siswa lain dari berbagai ras, suku, etnis dan agama. Berdasarkan hasil olah data survey, secara umum, dapat dikatakan bahwa para siswa menganggap lingkungan pembelajaran semacam ini telah terjadi di sekolah mereka. Salah satu indikator pentingnya adalah hampir semua siswa mengaku para guru tidak membedakan etnis dan agama dalam membagi-bagi kelompok belajar (Grafik 4). Pembagian kelompok-kelompok belajar lebih didasarkan pada pemerataan dalam prestasi belajar.

**Grafik 6.4**

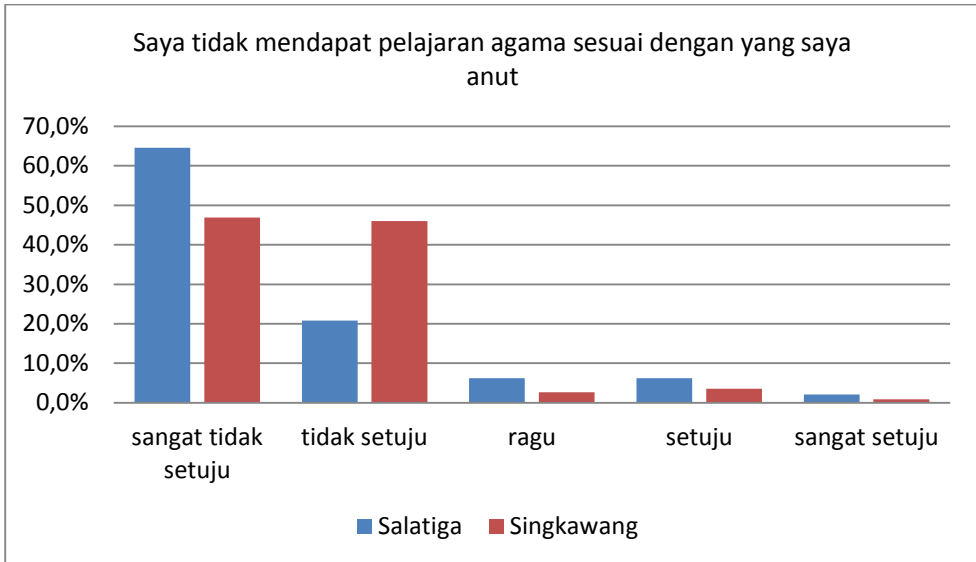
### **Apakah guru bersikap diskriminatif?**



Indikator lain dari keberadaan lingkungan pembelajaran yang mendukung kebinekaan adalah adanya pengajaran agama kepada para peserta didik sesuai dengan agama masing-masing. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa setiap peserta didik wajib memperoleh pengajaran agama di sekolah sesuai dengan agama yang dianutnya. Hal ini berarti lembaga pendidikan manapun wajib menyediakan guru agama kepada para siswa. Namun pada kenyataannya masih terdapat sekolah yang tidak memberi pengajaran agama sesuai dengan latar belakang agama siswanya. Hal ini terutama terjadi di sekolah swasta yang berbasis agama tertentu namun memiliki peserta didik berlatar belakang agama yang beragam. Seperti nampak dari pengakuan siswa dalam survey, sejumlah kecil responden menyatakan bahwa mereka tidak memperoleh pengajaran agama sesuai latar belakang agama mereka (Grafik 5). Sekolah biasanya memberi pengajaran agama sesuai dengan agama mayoritas atau nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh sekolah kepada semua siswa. Namun, berdasarkan hasil pendalaman melalui wawancara, tiadanya pengajaran agama yang relevan kepada siswa minoritas tidak membuat para siswa dan orangtua siswa keberatan. Di sebuah sekolah Kristen di Salatiga, sekolah dan orangtua telah menandatangani kesepakatan bahwa para siswa minoritas tersebut hanya akan memperoleh pengajaran agama Kristen dalam bentuk nilai-nilai universal non-ritual.

**Grafik 6.5**

**Apakah siswa memperoleh pelajaran agama sesuai dengan agamanya?**

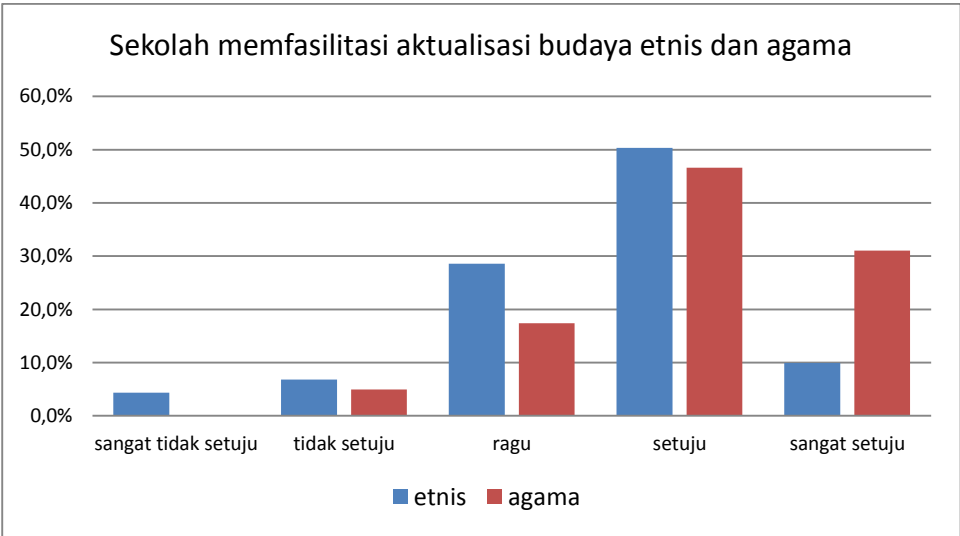


Meskipun pengajaran agama cukup terbatas, namun umumnya sekolah memberikan kesempatan yang sama kepada para siswa berbeda agama dan etnis untuk mengaktualisasikan budaya mereka. Di sebuah sekolah Kristen di Salatiga, misalnya, disediakan musholla untuk siswa Muslim. Para siswa Muslim juga diizinkan untuk melaksanakan shalat Jumat. Selain itu, sekolah juga merayakan hari raya semua agama di mana kelompok vokal dari agama Kristen selalu turut menyumbangkan lagu. Para siswa dari Papua juga diberi kesempatan menampilkan tarian Papua dalam acara-acara sekolah. Namun, tentu saja kesempatan aktualisasi budaya kelompok minoritas tidak sebanyak rekan-rekan mayoritas mereka. Sebagaimana terekam dalam hasil survey, cukup banyak siswa yang mengaku bahwa ekspresi budaya mereka belum terwadahi. Para siswa beragama Islam di sekolah Kristen, misalnya, tidak memperoleh kesempatan mengembangkan minat dalam kesenian Islam, misalnya seni membaca Quran. Pada batas tertentu, hal ini bisa

dipahami karena hukum pasar sederhana: tidak banyak orang di sekolah yang bisa mengapresiasi ekspresi budaya siswa minoritas tersebut. Namun, dalam konteks pendidikan kebinekaan, dorongan kepada siswa minoritas untuk mengembangkan identitas budayanya perlu dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, sekolah Kristen bisa mengirim siswa beragama Islam untuk berpartisipasi dalam lomba MTQ di tingkat kecamatan atau kabupaten/kota.

**Grafik 6.6**

**Apakah aktualisasi budaya siswa yang beragam mendapat tempat di sekolah?**



**C. Sikap Kebinekaan dalam Memilih Pemimpin**

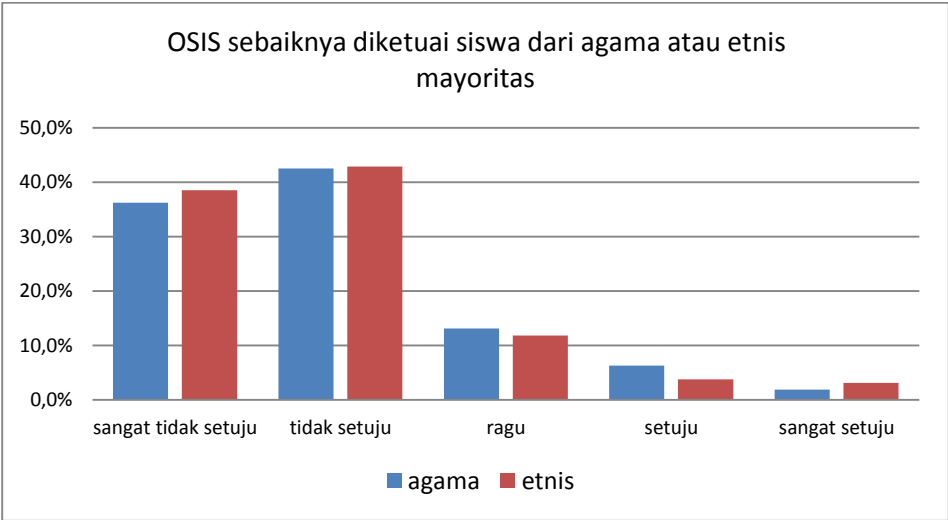
Isu kepemimpinan merupakan isu yang cukup sensitif dalam masyarakat multikultur seperti Indonesia. Beberapa kelompok ada yang meyakini bahwa seberapa beragam apapun masyarakat, seorang pemimpin haruslah orang yang berasal dari kelompoknya. Namun, Indonesia menganut suatu konsensus kebangsaan yang menjunjung tinggi hak setiap warga bangsa untuk menjadi pemimpin di sektor publik tanpa melihat latar belakang etnis dan agama. Masalahnya, meskipun

telah menjadi kesepakatan konstitusional pemahaman seperti ini tidak bisa diterima dengan mudah oleh seluruh unsur masyarakat.

Di sekolah-sekolah, siswa telah dilatih kepemimpinan melalui keterlibatan dalam Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Survey dalam penelitian ini menanyakan pendapat siswa dalam hal memilih pemimpin OSIS dan sebagian besar menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju ketika ditawarkan sebaiknya organisasi tersebut dipimpin oleh siswa dari agama atau etnis mayoritas. Hasil ini merupakan gabungan jawaban siswa di Kota Salatiga dan Singkawang. Namun demikian, tetap saja terdapat sebagian kecil responden yang menjawab ragu-ragu dan bahkan mendukung pernyataan yang bertentangan dengan ide kebinekaan tersebut.

**Grafik 6.7**

**Bagaimana Siswa Memilih Ketua OSIS**

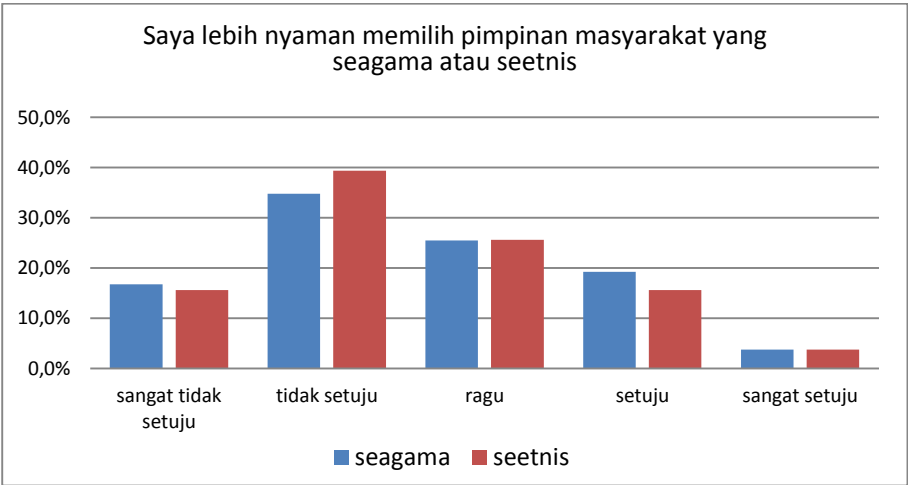


Aspek lain dari isu kepemimpinan yang menarik adalah kepemimpinan dalam aspek yang lebih luas, yaitu di lingkungan masyarakat di luar sekolah. Kepemimpinan masyarakat yang dimaksud di sini adalah kepemimpinan dalam organisasi masyarakat di lingkungan rumah siswa seperti RT, RW, dan desa/kelurahan. Mayoritas siswa menyatakan bahwa etnis dan agama menjadi aspek utama dalam

memilih pemimpin masyarakat. Namun demikian, masih terdapat lebih dari 40 persen yang ragu atau bahkan berpendapat sebaliknya. Banyaknya siswa yang ragu dalam bersikap atau bahkan cenderung memilih sikap yang eksklusif bisa disebabkan oleh ketergantungan pada pilihan orangtua atau keluarga.

Grafik 6.8

Bagaimana siswa memilih pemimpin masyarakat?

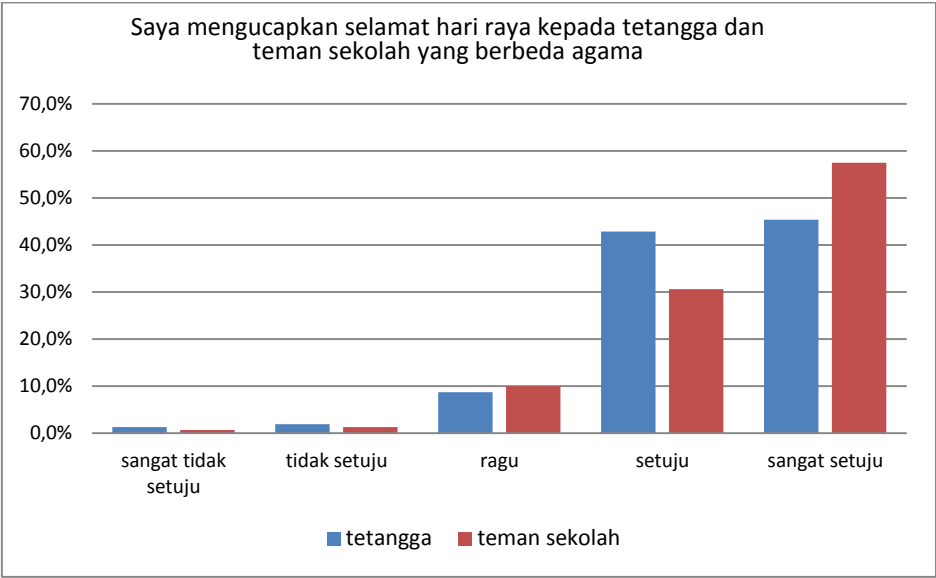


D. Sikap Kebinekaan Terkait Toleransi Agama

Sebagaimana diungkapkan oleh Parekh (2000), toleransi antarumat beragama adalah salah satu pilar utama multikulturalisme. Di Indonesia, toleransi agama juga merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam membangun bangsa. Meski demikian, persoalan dalam relasi antarumat beragama di Indonesia selalu muncul dari waktu ke waktu mengingat ada doktrin-doktrin agama yang bersifat absolut dan terkadang bertentangan antara satu agama dengan yang lain. Pada tahun 1981, misalnya, telah muncul fatwa MUI yang melarang umat Islam mengucapkan selamat hari raya Natal kepada umat Kristiani. Fatwa ini cukup kontroversial dan memicu perdebatan panjang, bahkan hingga saat ini. Penelitian ini menggali persepsi siswa tentang bagaimana sikap

mereka mengenai ucapan selamat hari raya kepada pemeluk agama lain di sekolah maupun di masyarakat sekitar rumah mereka. Memang tidak disebutkan secara spesifik hari raya agama apa, namun mengingat sebagian besar responden penelitian ini beragama Islam dan Kristen jawabannya cukup menarik. Kebanyakan siswa tidak mempermasalahkan ucapan selamat hari raya kepada teman sekolah maupun tetangga yang berbeda agama (Grafik 6.9).

**Grafik 6.9**  
**Sikap Siswa tentang Ucapan Selamat Hari Raya**  
**Kepada Pemeluk Agama Lain**

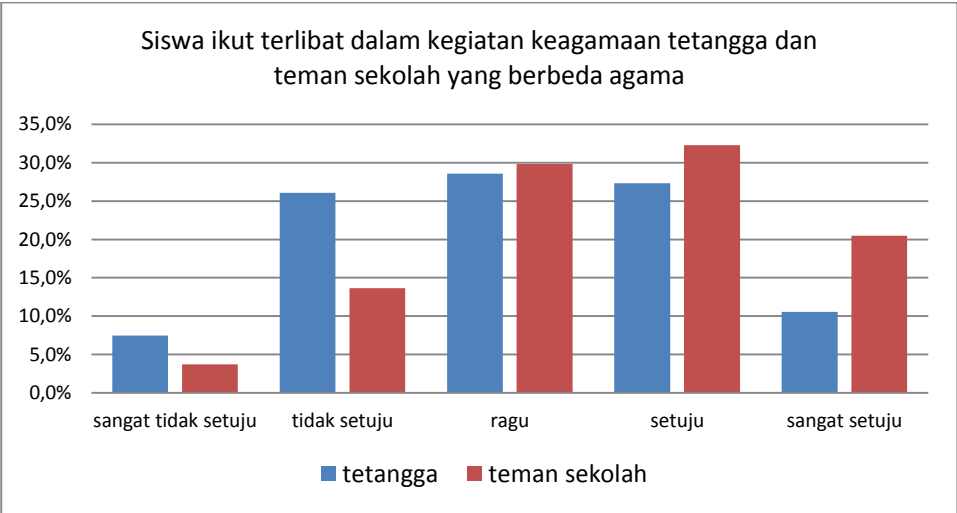


Namun, ketika pertanyaan diajukan menyangkut sikap toleransi yang lebih aktif, yaitu sejauh mana siswa terlibat aktif dalam kegiatan agama lain, maka proporsi dari variasi jawabannya cukup berimbang. Sebagaimana tercermin dalam diagram batang di bawah (Grafik 6.10), selisih antara mereka yang setuju dan tidak setuju untuk terlibat dalam kegiatan agama lain tidak terlalu besar, meskipun tetap lebih banyak mereka yang setuju. Namun jika dibandingkan sikap para siswa kepada teman sekolah dan tetangga, maka kecenderungan untuk terlibat dalam

kegiatan agama lain di sekolah lebih besar daripada di lingkungan sekitar rumah. Hal ini lagi-lagi menunjukkan pengaruh orangtua dan lingkungan terhadap pilihan sikap siswa di rumah. Sementara di sekolah, siswa cenderung lebih bebas bersikap. Hal ini menunjukkan bahwa sikap toleran di sekolah belum tentu mencerminkan perilaku yang sama di luar sekolah. Pengaruh lingkungan dan terutama keluarga sangat penting untuk mendukung pendidikan toleransi di luar sekolah.

**Grafik 6.10**

**Sikap Siswa tentang Keterlibatan dalam Kegiatan Keagamaan Lain**



Sikap toleran dalam hal memberi ucapan selamat hari raya dan berpartisipasi dalam kegiatan agama lain adalah bentuk dari apa yang disebut sebagai toleransi aktif. Banyak orang memilih untuk bersikap toleran, namun secara pasif. Dalam hal ini, mereka menghormati hari raya dan perayaan kegiatan agama lain tanpa harus mengekspresikannya secara aktif dan dengan tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan konflik atau gesekan. Hal ini juga bisa dianggap sebagai sikap toleran. Namun, sebagaimana kata Prince Feisal Al-Hussein (2016), "toleransi

saja tidak cukup". Dalam konteks pendidikan multikultural dan situasi tatanan global yang rentan konflik sikap toleransi aktif sangat penting untuk mempromosikan perdamaian (Al-Hussein, 2016).

## **BAB VII**

### **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Simpulan**

1. Kebijakan sekolah dalam menerapkan nilai-nilai kebinekaan:
  - a. Melakukan pembauran antar siswa dari latar belakang agama dan etnis yang berbeda dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, serta dalam kepanitiaan kegiatan dan organisasi. Dengan demikian, siswa menjadi terbiasa dan saling menerima serta menghargai perbedaan.
  - b. Membiasakan berdoa pada saat mulai dan selesai pembelajaran, dan budaya senyum salam sapa.
  - c. Penghormatan kepada bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya, memajang foto/gambar para pahlawan di setiap ruang kelas, dan program mengenal Nusantara (bekerjasama dengan BUMN). Selain itu, ada program afirmasi untuk menerima siswa dari berbagai daerah, seperti: Papua, Maluku, Sulut, dan NTT.
  - d. Memberi ruang/wadah untuk mengaktualisasikan agamanya (peringatan hari besar keagamaan, shalat berjamaah, membaca Quran, persekutuan do'a, retreat, lomba MTQ, dan lain-lain).
  - e. Menyelenggarakan festival budaya daerah, antara lain saat merayakan Hari Kartini.
2. Nilai-nilai kebinekaan yang dikembangkan di sekolah:
  - a. Toleransi dengan saling menerima perbedaan;
  - b. Menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan;
  - c. Saling menghormati, saling menghargai, dan bekerjasama;
  - d. Cinta damai, nilai-nilai kasih yang universal.

3. Peran guru dalam menerapkan pendidikan kebinekaan:
  - a. Meningkatkan mutu pembelajaran sehingga lebih menarik, antara lain: selalu memperkaya literatur, mencari narasumber/sumber belajar dalam bentuk audio visual; bermain peran, diskusi dan kerja kelompok multi agama, suku, dan budaya.
  - b. Memberikan wawasan kebangsaan dan kebinekaan, serta mengaktualisasikan dalam bentuk kegiatan di lapangan yang bisa menciptakan situasi yang harmonis, nyaman dan menggembirakan. Contohnya dengan membiasakan siswa untuk bergaul dengan semua teman tanpa membedakan agama dan etnis, saling menghormati dan menghargai walaupun berbeda keyakinan, serta berpikir positif terhadap peristiwa-peristiwa yang mengarah sikap intoleransi (tidak terburu-buru mencurigai).
4. Kendala guru dalam menerapkan pendidikan kebinekaan:
  - a. Sarana prasarana yang kurang memadai;
  - b. Siswa masih dipengaruhi oleh faktor keluarga yang kuat ikatan primordialnya;
  - c. Pemahaman masing-masing agama bahwa agamanya merupakan yang terbaik, sedangkan agama yang lain kurang baik/salah. Pemahaman sudah mengakar di masyarakat;
  - d. Siswa dari usia dan karakternya masih labil, sehingga karena pengaruh eksternal (antara lain media sosial), maka muncul sikap intoleran, bahkan radikal, antara lain ditunjukkan dengan sikap tertutup dan sulit menerima perbedaan, serta sikap kurang “sosial” atau sulit untuk berinteraksi dengan teman lain terutama yang berbeda keyakinan. Selain itu, perbedaan bahasa terkadang bisa menyebabkan salah tafsir.
5. Peran Pemerintah Daerah dan *stakeholders*:
  - a. Mendorong sekolah melakukan pendataan siswa yang belum dilayani pendidikan agama sesuai dengan agama yang

- dianutnya. Data diserahkan kepada Disdik untuk ditindaklanjuti dengan penyiapan guru agama yang dibutuhkan.
- b. Kesbangpol memiliki kegiatan yang terkait dengan pengelolaan kebinekaan, yaitu revitalisasi nilai-nilai Pancasila, sosialisasi tentang narkoba, dan seminar/diskusi/pelatihan yang berkaitan dengan kebinekaan.
  - c. Kegiatan carnaval untuk merayakan kebinekaan.
  - d. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang difasilitasi Kemenag selalu mengadakan pertemuan rutin dalam membahas persoalan terkait kebinekaan dan keagamaan.
  - e. Mengembangkan sekolah berwawasan kebangsaan, antara lain penamaan pulau-pulau di Indonesia, pahlawan nasional, dan sebagainya. Selain itu, sebelum jam pelajaran awal semua siswa menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan pada jam terakhir menyanyikan lagu-lagu daerah. Setiap guru harus bisa menyanyikan lagu-lagu daerah.

## **B. Rekomendasi**

1. Perlu penguatan kurikulum tentang pemahaman kebinekaan dan penerapannya dengan melakukan pembauran antar agama dan etnis yang berbeda melalui kerja kelompok dalam kegiatan/pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Penguatan hal tersebut dilakukan Kemendikbud melalui Pokja Penguatan Pendidikan Karakter yang telah dibentuk, sedangkan untuk implementasi di sekolah bisa dikoordinir oleh guru PPKn, dan guru Agama.
2. Perlu peningkatan kegiatan yang bersifat pembauran lintas budaya dan agama antara lain *camp* kerukunan umat beragama, *live-in* (tinggal bersama di lingkungan yang berbeda agama dan budaya), serta memperluas program afirmasi dari daerah yang berbeda etnis dan agama.
3. Forum guru diharapkan dapat menjalankan fungsinya sebagai pengembang kurikulum (*curriculum developer*) kreatif dan inovatif

dalam pembelajaran berbasis kebinekaan/multikultural dan keteladanan sikap serta perilaku saling menghargai dan menghormati keanekaragaman budaya yang berbeda, namun dapat hidup berdampingan secara damai.

4. Kepala sekolah harus mendorong pengembangan pendidikan nilai-nilai multikultural seluas-luasnya; memberikan kesempatan kepada siswa dan guru untuk melaksanakan kegiatan yang bernuansa etnik, agama, dan budaya di sekolah secara periodik.
5. Pemerintah daerah direkomendasikan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan; membuat kebijakan yang proporsional yang memenuhi rasa keadilan; memelihara kerukunan antar etnik, agama, dan budaya; dan mengantisipasi setiap potensi perpecahan di masyarakat.
6. Para siswa perlu terus dibekali semangat bela negara yang dapat menumbuhkan nasionalisme melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler (latihan kepemimpinan, pramuka, dan sebagainya).

## PUSTAKA ACUAN

- Al-Hussein, Prince Feisal. "Tolerance is Not Enough: Why Active Tolerance is Needed Now More than Ever?" The Huffington Post, 16 November 2016;
- Bhiku Parekh. *The Concept of Multicultural Education in Sohen Modgil, et.al.(ed) Multicultural Education the Intermittable Debate*. London: The Falmer Press, 1996;
- Bikhu Parekh. *Rethinking Multiculturalism; cultural diversity and political theory*. Cambridge; Harvard University Press, 2000
- Breuce Joyce and Marsha Weil. *Models of Teaching*. Massachusetts: A Simon & Schuster Company 1996, hlm. 7;
- Depdiknas. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 923.
- Exploring A Teacher's Understanding And Practices," *The Journal of International Social Research*, Vol. 4, Issue: 17, Spring 2011, p. 578-598;
- H.A.R. Tilaar. *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Paedagogik Transformatif Untuk Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2002, hlm. 15.
- Hendra Kurniawan. Sejarah Tionghoa sebagai Pendidikan Kebinekaan. Majalah BASIS Nomor 11-12 tahun ke 64, 2015;
- I Nyoman Sudana Degeng. *IlmuTaksonomi Variabel*. Jakarta: Depdikbud, 1989, hlm. 37, 83;
- Ilknur Tarman and Bülent Tarman. "Developing Effective Multicultural Practices: A Case Study Of
- International Crisis Group. Communal Violence in Indonesia; Lesson from Kalimantan. ICG Brussel, Belgia 27 Juni 2001;
- James A Banks. *Diversity Within Unity: Essential and Principal for Teaching and Learning in Multicultural Society*. Published by Center For

- Multicultural Education, College of Education, University of Washington, Seattle, 2001, page 3
- James A. Banks. *An introduction to multicultural education*. Boston: Allyn and Bacon, 2002, page 5;
- Komisi Orang Hilang dan Tindak kekerasan (Kontras). Negara Yang Tak Kunjung Terusik, Laporan HAM peristiwa penyerangan Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik Pandeglang. Kontras, 19 April 2011;
- Komnas HAM. (2014). Pemantauan dan penyelidikan peristiwa bentrokan antarwarga, di Dusun Tanjung Rejo, Desa Tanjung Harapan, Kec. Tuha Kab Lampung Tengah;
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi Indonesia I*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014, hlm. 193;
- Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP). Radikalisme di Kalangan Siswa. Koran Tempo, 29 April 2011
- LSM SEJUK. Kado Paskah dari Aceh untuk Anies Baswedan. <http://sejuk.org/2016/03/26/kado-paskah-dari-aceh-untuk-anis-baswedan/>;
- Mark. K. Smith. *Teori Pembelajaran dan Pengajaran*. Yogyakarta: Mirza Media Pustaka, 2009. hlm. 30-31.
- Paul C. Gorski. 2010. "The challenge of defining 'multicultural education'." Diakses dari [www.edchange.org/multicultural/initial.html](http://www.edchange.org/multicultural/initial.html).
- Ridwan al-Makassary (Edit). Cerita Sukses Pendidikan Multukultural di Indonesia, sebuah laporan tentang evaluasi intervensi program pendidikan multikultural oleh TifA bekerjasama dengan CSRC UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, Jakarta, 2010, hal. 10-11;
- SETARA Institute. Laporan Survey tentang Perspesi Siswa SMU Negeri di Jakarta dan Bandung terhadap Toleransi, 2015;
- Ubeidilah Badrun, dkk. Pengembangan Model Pendidikan Kebangsaan Bagi Pemuda Lintas Budaya, 2015;
- W. Gulö. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Grasindo, 2002, hlm. 8.

- Wahid Institue. Lampu Merah Kebebasan Beragama di Indonesia. Laporan Wahid Institute tentang Kebebasan Beragama dan Toleransi tahun 2011;
- Wise, Amanda dan Velayutham, Selvaraj. "Introduction: Multiculturalism and Everyday Life" dalam Wise, A dan Velayutham, S (eds). *Everyday Multiculturalism*. London: Palgrave Macmillan, 2009, hlm. 1-17
- Zamroni. *Pendidikan demokrasi pada masyarakat multikultural*. Yogyakarta: Gavin Kalam Utama, 2011